

**IRIGASI DI BONE, 1911-1942**

*IRRIGATION IN BONE, 1911-1942*

**TESIS**



**SURATMAN**

**(F052211002)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**TESIS**

**IRIGASI DI BONE, 1911-1942**

*IRRIGATION IN BONE, 1911-1942*

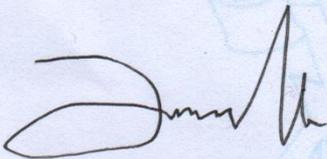
Disusun dan diajukan oleh:

**SURATMAN**  
**Nomor Pokok F052211002**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 04 Desember 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

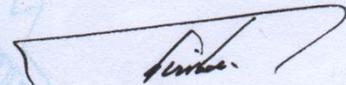
Menyetujui  
Komisi Penasehat

**Konsultan I**



Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.  
NIP. 19741016 200312 1 001

**Konsultan II**



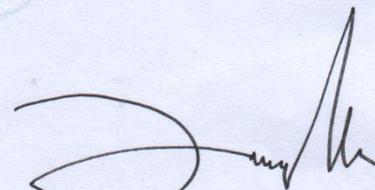
Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum  
NIP. 195709121 98503 1 003

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin**

**Ketua Program Studi  
Magister Sejarah**



Prof. Dr. Akin Duli., M.A.  
NIP. 19640716 199103 1 010



Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.  
NIP. 19741016 200312 1 001

## HALAMAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Suratman

NIM : F052211002

Departemen/Program Studi : Sejarah/Strata II (S2)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

### IRIGASI DI BONE, 1911-1942

Adalah karya ilmiah sendiri. Karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin. Penulisan karya ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila dikemudian hari ternyata ada unsur plagiarism dan data tidak bisa dibuktikan dengan metode historiografi, saya bersedia menerima aturan sanksi yang berlaku.

Makassar, 04 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



Suratman

\*\*\*\*\*

Tesis ini dipersembahkan  
Kepada kedua orang tua penulis  
(Ayahanda Suardi Nodding dan Ibunda Ratna Nengsih Gani),  
sosok tercinta yang tak lekang oleh waktu mensupport proses penyelesaian  
dan memberikan dorongan semangat.

Kalimat kasih kepada adik penulis yang tersayang,  
Suratmi. Adik yang menjadi teman cerita dan berbagi keluh kesah.

\*\*\*\*\*

## **KATA PENGANTAR**

*Sukkur* *Mannenungeng* *Mappoji* *Lao* *Ri* *Puang* *Allah* *Ta'ala*.  
*Alhamdulillah*, Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Irigasi di Bone, 1911-1942”. Tujuan penulisan ini notabene sebagai syarat kelulusan Program Magister Sejarah dalam aturan akademik Universitas Hasanuddin.

Terima kasih kepada civitas akademika Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc (Rektor), Prof. Dr. Akin Duli, M.A (Dekan Fakultas Ilmu Budaya) dan juga staff Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya, Pak Mullar, Kak Satria dan Kak Wini. Selain itu, terima kasih kepada para Pembimbing Amrullah Amir, M.A., Ph.D. dan Dr. Suriadi Mappangara M.Hum., serta para penguji: Dr. Ilham, S.S., M.Hum. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum, Dr. Nahdia Nur, M.Hum telah menjadi sosok penting bagi penulis. Mereka sosok pengganti yang memberi kasih sayang selayaknya seperti orang tua penulis, mereka memberikan arahan, saran, kritik dan komentar, sehingga buah tulisan ini hadir kepada pembaca. Juga kepada kakak-kakak panutan Mahasiswa Pascasarjana S2-Sejarah, serta keluarga besar HUMANIS KMFIB-UH.

Akhir kata, terima kasih atas dukungan berbagi kisah mengantarkan penulis menyelesaikan studi.

**Makassar, 04 Desember 2023**



**Suratman**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR PETA.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Kajian Pustaka .....	9
1.5. Kerangka Konseptual dan Pendekatan .....	15
1.6. Metodologi Penelitian.....	19
1.7. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II.....	23
MASYARAKAT PERTANIAN DI BONE.....	23
2.1. Bone Dibawah Penguasaan Kolonial .....	23
2.2. Masyarakat Pertanian Dan Kondisi Sosial-Ekonomi Di Masa Peralihan.....	36
2.3. Pertanian Bone Di Masa Peralihan .....	40
BAB III.....	53
IRIGASI DI BONE, 1911-1942.....	53
3.1. Irigasi Sebagai Pendekatan Politik.....	53
3.2. Studi Kelayakan 1911 .....	56
3.3. Perencanaan Irigasi 1911-1920 .....	58
3.4. Pembangunan Irigasi 1920-1942.....	65
3.5. Operasi Dan Pemeliharaan Saluran.....	79
BAB IV .....	82
PENGARUH IRIGASI TERHADAP PEREKONOMIAN DI BONE.....	82
4.1. Pengaruh Irigasi Terhadap Sektor Pertanian .....	83
4.2. Pengaruh Irigasi Terhadap Perekonomian Di Bone .....	89
BAB V.....	99
KESIMPULAN .....	99

DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN .....	107

## DAFTAR PETA

Peta 1. Gambaran Umum Dari Sulawesi Bagian Barat Daya, Tahun 1921 .....	27
Peta 2. Wilayah Afdeeling Bone Tahun 1935 .....	31
Peta 3. Irigasi Lerang tahun 1941 .....	66
Peta 4. Irigasi Maradda.....	67
Peta 5. Irigasi Palakka tahun 1941 .....	69
Peta 6. Irigasi Palakka, 1933. ....	70
Peta 7. Irigasi Pattiro pada tahun 1933.....	71
Peta 8. Irigasi Pattiro di Afdeeling Bone, 1941 .....	73
Peta 9. Irigasi Palengorang tahun 1941 .....	77
Peta 10. Irigasi Bengo tahun 1941.....	78
Peta 11. Irigasi Afdeeling Bone Tahun 1941 .....	83

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Pembangunan bendung irigasi di Sungai Palakka (1923-1925).....	68
Gambar 2. Bendung irigasi Pattiro di Katompi pada tahun 1930 an .....	72
Gambar 3. Kapal-Kapal di sekitar Pelabuhan Pallime pada tahun 1924 .....	95

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Kondisi hasil panen di Bone (selatan) tahun 1905-1914 .....	45
Tabel 2. Hasil panen di Bone Selatan tahun 1910-1914 .....	46
Tabel 3. Statistik curah hujan di Watampone (1906-1913) .....	47
Tabel 4. Statistik curah hujan di Bone Selatan (1906-1913) .....	48
Tabel 5. Pendapatan Pajak Onderafdeeling Bone 1910-1913.....	59
Tabel 6. Pajak Onderafdeeling Bone Ri-Attang, 1910-1914.....	60
Tabel 7. Wajib Pajak Onderafdeeling Bone Selatan 1914.....	61
Tabel 8. Tesang padi di Afdeeling Bone 1915-1920 dalam angka gulden. ....	62
Tabel 9. Tesang padi di Afdeeling Bone 1919-1930 dalam angka gulden .....	93
Tabel 10. Ekspor Beras dalam angka pikul tahun 1927-1930 di Bone.....	96

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. J.A.M Buuren, Irrigatie rapport van Celebes. 1915.....	107
Lampiran 2.J.L. M. Swaab, MvO Gouvernement van het Celebes 1936. ....	110
Lampiran 3.Ter Laag, MvO van het Gouv. Celebes, 1940.....	112
Lampiran 4.Heringa, MvO Assistent Resident Bone, Nationaal Archief.....	114
Lampiran 5. M. Van Rhijn, MVO Assistent Resident Bone, 1931a.....	126
Lampiran 6.M. van Rhijn, MVO Assistent Resident Bone, 1931b. ....	128
Lampiran 7.Veen, MvO Asisten Residen Bone, 1935.....	136
Lampiran 8. SK Pembimbing dan Penguji.....	141

## DAFTAR ISTILAH

Afdeeling	: Bagian Pemerintahan
Arumpone	: Sebutan untuk panggilan Raja di Kerajaan Bone
Asisten residen	: Pejabat eropa yang menjabat di pemerintahan
Bahu	: Ukuran tanah yang digunakan cakupan luas lahan
Controleur	: Pejabat yang bertanggungjawab di bagian pemerintahan
Distribusi	: Penyaluran kepada orang atau beberapa tempat
Distrik	: Bagian kota atau negara yang dibagi untuk tujuan tertentu
Eksploitasi	: Penguasaan atau pendayagunaan, pemerasan.
Ekspor	: Pengiriman barang keluar negeri
Gulden	: Mata uang pemerintah Kolonial
Imperialisme	: Sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain
Insinyur	: Sarjana Teknik
Integrasi	: Pembauran hingga menjadi kesatuan
Lumbung	: Tempat menyimpan hasil pertanian
Mandoer	: Orang bertugas mengepalai orang dalam pengawasan.
Onder Afdeling	: Cabang Pemerintahan
Pikul	: Satuan ukuran berat 62,5 Kg

## ABSTRAK

### **Suratman. Irigasi di Bone, 1911-1942. (Pembimbing; Amrullah Amir dan Suriadi Mappangara).**

Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan irigasi di Bone antara tahun 1911 dan 1942 dengan fokus melacak latar belakang, proses pembangunan, dan dampak irigasi terhadap sektor pertanian, masyarakat, dan perekonomian di Bone pada periode tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan mengapa Bone dipilih sebagai salah satu wilayah pembangunan irigasi oleh Pemerintah Hindia Belanda, merinci proses pembangunan irigasi, dan mengidentifikasi pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian Pemerintah kolonial. Metode penelitian ini terdiri dari tahapan pengumpulan sumber, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh menggunakan sumber tulisan berupa arsip, artefak, peta, dan majalah. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasi sesuai dengan masalah yang diajukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bone memiliki strategisitas sebagai wilayah agraris, didukung oleh potensi sumber daya manusia dan alam. Mayoritas masyarakat bergantung pada sektor pertanian. Pada tahun 1910, curah hujan yang tinggi dan genangan lahan persawahan menyebabkan kegagalan panen di Bone. Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan kondisi tersebut, menjadikan irigasi sebagai sarana perdamaian, dan memuluskan kepentingan ekonomi politiknya. J.A.M Van Buuren melakukan studi kelayakan wilayah potensi geografis pada tahun 1911. Sungai Walanae, yang merupakan gugusan bentang lahan yang menyebar di sungai Palakka dan Sungai Pattiro, diidentifikasi sebagai sumber pengairan pertanian. Hasil dari studi tersebut membuka gambaran pembangunan irigasi. Irigasi mulai dibangun secara intensif mulai tahun 1920 dengan model semi dan permanen di Lerang, Maradda, Palakka, Pattiro, Palengoreng, Amali, Wolangi, Melle, Pacing, Bengo, Lanca, dan Padang Lampe. Secara bertahap, mulai dari bangunan bendung, ledeng, hingga saluran-saluran kanal. Rentang waktu 1920-1942 mencatat peningkatan signifikan dalam hasil produksi dan ekspor dari sektor pertanian, kontribusi tersebut menjadi pemasukan bagi kas kolonial. Peningkatan produksi ini mempengaruhi dan meningkatkan aktivitas pelayaran dan perdagangan di Pelabuhan-pelabuhan di Bone, seperti Pallime, Bajoe, Ujung Pattiro, dan Barebbo.

**Kata Kunci:** Pembangunan, irigasi, pertanian, perekonomian, kolonial, Bone.

## ABSTRACT

**Suratman. Development of Agricultural Irrigation in Efforts for Economic in Bone, 1911-1942. (Supervised by Amrullah Amir and Suriadi Mappangara).**

The research explores the irrigation development in Bone between the years 1911 and 1942 by focusing to track the background, development process, and irrigation impact on the agricultural sector, community, and economy in Bone in that period. The research aims at disclosing why Bone was chosen one of the irrigation development areas by the Dutch East Indies Government, encompassing the irrigation development process, and identifying its effect on the colonial government economic development. The research method comprised the resource collection, heuristic, verification, interpretation, and historiography stages. Data were obtained using the written resources in the forms of the archives, artefacts, maps, and magazines. The data were then analysed and interpreted in line with the problems proposed. The research results indicate that Bone has the strategic position as the agrarian area supported by the human and natural resource potentials. The majority of people are dependent on the agricultural sector. In 1910, the high rainfall and rice field flooding caused the harvest failure in Bone. The Dutch East Indies Government utilised the condition, made the irrigation as the peaceful facility, and smoothed out its economic and political interests. J.A.M. Buuren conducted the feasibility study of the geographical potential areas in the year 1911. Walanae river, representing the landscape cluster spreading to Palakka river and Pattiro river, was identified as the agricultural irrigation source. The study result opened the irrigation development depiction. The irrigation was developed intensively and gradually starting from the year 1920 with the semi-permanent and permanent models in Lerang, Maradda, Palakka, Pattiro, Palengoreng, Amali, Wolangi, Melle, Pacing, Bengo, Lanca, and Padang Lampe. The development started from the dams, pipes to the canals. The time span of 1920-1942 recorded the significant improvement in the production and export results from the agricultural sector, the contributions became the income for the colonial treasury. The production improvement affected and increased shipping and trading activities in some ports in Bone such as in Pallime, Bajoe, Ujung Pattiro, and Barebbo.

Keywords: Development, irrigation, agriculture, economy, colonial, Bone.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Irigasi merupakan sistem pengaliran air yang membentuk lanskap pertanian dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai suatu topik memanusiakan air, konteks irigasi menyoroti tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam, menjelajahi kompleksitas dan relevansi irigasi. Bagaimana dapat memahami, memanfaatkan, dan melindungi sumber daya air melalui prisma peradaban, teknologi, dan kebijakan. Inovasi teknologi irigasi yang diciptakan, menjadi landasan bagi perkembangan sistem pertanian dan menciptakan kerangka hidup bagi masyarakat agraris dan memungkinkan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.<sup>1</sup>

Sistem pengelolaan irigasi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa Pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan pembangunan sistem irigasi teknis pada abad ke-19. Pembangunan irigasi dimasa kolonial dibagi kedalam tiga tahapan periode. Periode pertama, antara tahun 1830-1185 merupakan tahap pembangunan fisik bangunan utama, masa tahun 1885-1920 merupakan pembangunan jaringan irigasi secara utuh dan tahap ketiga, periode 1920-1942

---

<sup>1</sup> Kusters, K. *Lanskap Cerdas-iklim dan Pendekatannya*. Topenbos Indonesia, Bogor, Indonesia, 2017, hlm. 8-21.

merupakan tahapan pelaksanaan operasional sistem secara mantap. Tahapan ini berkaitan dengan stabilitas administrasi Negara Kolonial Hindia Belanda.<sup>2</sup>

Kepentingan kolonial dengan gaya imperialisme modern telah merubah pola politik kekuasaan dan ekonomi di Hindia Belanda. Percepatan ekspansi kolonial antara tahun 1870-1914, telah membuka dan mengamankan wilayah-wilayah baru kekuasaan. Percepatan tersebut dipengaruhi dari persaingan dagang antara Belanda dan Inggris, reaksi Belanda atas persaingan tersebut, mengamankan wilayah-wilayah kekuasaan di Luar Jawa dan Madura dengan jalan penaklukan. Penaklukan yang dilakukan tidak hanya difokuskan pada upaya mengamankan teritorial kekuasaan secara politis, tetapi juga sebagai upaya untuk membuka wilayah-wilayah investasi baru. Pelaksanaan kebijakan etis turut menjadi faktor yang mempengaruhi percepatan ekspansi ke wilayah-wilayah di luar Jawa dan Madura, khususnya penaklukan militer atas kerajaan Bone di Sulawesi Selatan pada tahun 1905.<sup>3</sup>

Program politik etis<sup>4</sup> telah membawa haluan perpolitikan kolonial di wilayah-wilayah administratif pemerintahan baru. Untuk mendukung politik etis, irigasi menjadi salah satu aspek krusial yang ditujukan untuk menjaga ketahanan

---

<sup>2</sup> Arif, Sigit Supadmo, *Mengembalikan Irigasi Untuk Kepentingan Rakyat*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu teknik dan manajemen irigasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Mei 2009, hlm. 4.

<sup>3</sup> M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 71.

<sup>4</sup> Secara garis besar politik etis ini terangkum dalam tiga program irigasi (pengairan), emigrasi, dan edukasi. Lihat Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1995, hlm. 36.

pangan, produktivitas pertanian dan mencapai tujuan ekonomi politiknya.<sup>5</sup> Irigasi teknis dipandang sebagai strategi dalam mendukung politik pangan Pemerintah Hindia Belanda.<sup>6</sup> Inovasi teknologi pertanian pada masa itu mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan baru dan aspirasi penguasa kolonial dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ditemui di wilayah-wilayah baru taklukan, seperti Bone.

Setelah Bone takluk tahun 1905, wilayah ini sebagai lahan basah dalam arah pelaksanaan kebijakan etis. Bone dikenal sebagai salah satu wilayah agraris di Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-17, Bone telah menjadi kerajaan bercorak birokrasi agraris.<sup>7</sup> Corak tersebut menunjukkan bahwa keunggulan ekonomi di sektor agraris telah terhubung dan membentuk jaringan pemasaran dan perdagangan beras keluar daerah Sulawesi Selatan.<sup>8</sup>

Pada periode tahun 1900-an sampai 1912 merupakan periode penting dalam sejarah perberasan di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1910-1911, kondisi hasil panen di Bone mengalami kegagalan. Kegagalan panen tersebut disebabkan adanya fluktuasi curah hujan yang tinggi yang merendam lahan persawahan, berakibat pembusukan pada akar tanaman padi. Hal inilah Pemerintah Hindia Belanda

---

<sup>5</sup> M.C Ricklefs, *Lot.Cit.*

<sup>6</sup> J.A.M. van Buuren (ingenieur), *Irrigatie rapport betreffende van Celebes*, 1911, hlm 1-3.

<sup>7</sup> Mukhlis Paeni, dkk, *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, Jakarta: Cv Dwi Jaya Karya, 1995, hlm. 54

<sup>8</sup> Taufik Ahmad, Syahrir Kila, *Awal Kebangkitan & Keruntuhan Pelabuhan Pallime di Bone*, Makassar, Pustaka Refeksi, 2016, hlm. 63.

mengubah kondisi perekonomian dan memanfaatkan kondisi tersebut dengan membuat sistem irigasi.

Hal ini sebagai syarat pertama dan utama memberikan kepastian yang lebih besar bagi panen padi penduduk.<sup>9</sup> Tujuan besar mengubah kondisi tersebut untuk menjamin peningkatan produktivitas pertanian, demi tersedianya kebutuhan domestik dan peningkatan hasil ekspor dari sektor pertanian yang sejalan dengan kepentingan ekonomi-politik pemerintah kolonial.<sup>10</sup> Bukan hanya dijadikan sebagai stimulus ekonomi, Pemerintah kolonial memanfaatkan kondisi tersebut, sebagai bagian strategi dalam rencana politiknya untuk menarik simpati masyarakat di Bone. Tujuannya tidak lain untuk meredakan gejolak perlawanan atas imbas peralihan kekuasaan kerajaan ke Pemerintahan administratif modern kolonial.<sup>11</sup>

Pada tahun 1911, upaya tersebut tampak jelas mulai direncanakan. Pengangkatan J.A.M. Van Buuren sebagai kepala insinyur yang melakukan penelitian potensi wilayah untuk pengamatan rencana pembangunan irigasi di Sulawesi Selatan, termasuk diwilayah Bone. Setelah J.A.M. Van Buuren melakukan studi kelayakan di Bone, dari Bone bagian utara, tengah dan Selatan

---

<sup>9</sup> *Terjemahan Memori Van Overgave Controlier Bone Riattang tahun 1912-1915*, Bidang Pelayanan dan Pembinaan Arsip, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015, hlm. 101.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 146-154.

menunjukkan lahan pertanian diwilayah ini didominasi sistem persawahan tadah hujan, atau proses produksinya bergantung pada pola curah hujan.<sup>12</sup>

Pada periode 1912-1920-an adalah rencana pembangunan irigasi yang nampak digagas pemerintah Hindia Belanda. Periode ini membawa pembangunan irigasi menjadi titik awal bangkitnya produksi dan perdagangan beras di daerah itu. Produksi dan perdagangan beras mulai membaik pada periode ini, ketika pembukaan irigasi sebagai penunjang produksi beras berjalan dengan baik. Areal sawah makin bertambah dan produksi meningkat. Beras pada periode ini tidak saja diperdagangkan, tetapi juga dijadikan sebagai bantuan untuk pembangunan jaringan jalan yang dibangun ke daerah-daerah penghasil padi.

Pembangunan irigasi mulai intensif dilaksanakan pada tahun 1920. Hal tersebut membutuhkan kesiapan dari biaya dan tenaga yang besar. Bukan hanya itu, persoalan kepentingan kebutuhan ekspor, ekspor beras masih kalah saing dengan komoditas kopra yang laku secara internasional pada kurun tahun 1910-1920.<sup>13</sup> Kurun tahun 1920-1941, infrastruktur irigasi yang dibangun secara skala semi dan permanen. Bangunan irigasi telah dibangun dalam kurun waktu tersebut,

---

<sup>12</sup> J.A.M. van Buuren, *Op.Cit.*, hlm. 3-7.

<sup>13</sup> Arlayana Abubakar, dkk. *Seri Buku Sejarah & Heritage: Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peranan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan*, Jakarta; Bank Indoensia Institute 2019, hlm. 48-54 dan hlm. 88-89.

diantaranya di Lerang, Maradda, Palakka, Pattiro, Wollangi, Amali, Palengorang, Melle, Pacing, Bengo, Padang Lampe dan Lanca.<sup>14</sup>

Pengaruh pembangunan irigasi terhadap peningkatan produksi menunjukkan peningkatan ekspor beras di pelabuhan Pallime dan Bajoe pada tahun 1932-1934.<sup>15</sup> Hal ini juga yang menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu daerah sentra produksi pertanian dan lumbung pangan kolonial di Sulawesi Selatan.<sup>16</sup> Selain itu, perusahaan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) yang menjadi basis pendukung mendukung pertumbuhan ekonomi di Bone. Upaya Pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan integrasi ekonomi dari aktivitas pelayaran dan perdagangan, tentu menguatkan Bone sebagai daerah pengeksport beras ke daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas, telah menunjukkan hal yang menarik terhadap wilayah Bone. Elemen fisik dari irigasi tersebut menjadi bagian penting upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang sejalan dengan kepentingan ekonomi-politiknya. Ulasan ini membuka pengantar fokus penelitian pada topik

---

<sup>14</sup> L.A. Emanuel. *Memory van Overgave van den aftreden Asistent Residen van Bone*, periode 1945-1948. Badan Perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Sulawesi Selatan. Lampiran 6.

<sup>15</sup> J.W. Th. Heringa, *Memory van Overgave Asistent Residen van Bone*, 1933, Nationaalarchief; W. R. C. Veen, *Memory van Overgave Asistent Residen van Bone*, 1935. Nationaalarchief.

<sup>16</sup> Syafaat Rahman Musyaqqat, *Jaringan Perdagangan Beras Dan Dinamika Pelabuhan Ekspor di Sulawesi Selatan Pada 1930-An*. Handep Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 4, No. 2, Juni 2021, hlm. 120.

<sup>17</sup> Barbara S Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DITII*, (Jakarta: Pusat Utama Grafiti, 1989), hlm. 62.

irigasi di Bone pada temporal tahun 1911-1942. Fokus penelitian ini lebih ditekankan pada upaya mengungkapkan gambaran latar belakang, proses dan pengaruh irigasi terhadap perekonomian di Bone.

## **1.2. Batasan dan Rumusan Masalah**

Masalah yang penulis akan kemukakan didalam pembahasan ini dibagi dalam rumusan, diantaranya:

1. Bagaimana pembangunan irigasi di Bone dari 1911-1942?
2. Bagaimana pengaruh irigasi terhadap perekonomian di Bone 1911-1942?

Dalam suatu karya ilmiah sejarah, seorang penulis senantiasa tidak terlepas adanya pembatasan ruang lingkup dan spasial. Mengenai batasan ruang lingkup spasial (ruang), penulis membatasi ruang lingkup ruang pembahasannya pada daerah-daerah potensial yang menjadi lokasi orientasi pembangunan irigasi kolonial. Pada masa pemerintahan kolonial, wilayah kerajaan Bone dibagi kedalam wilayah administratif *Afdeling* Bone, terdiri dari pembagian administratif tingkat *Onderafdeeling*, di Bone, Bone Utara dan Bone Selatan (*Bone Riattang*).<sup>18</sup> Tiga wilayah ini merupakan wilayah potensial yang didominasi dari lahan pertanian dan mayoritas masyarakat berkecimpung dalam profesi petani, adalah keuntungan bagi pemerintah Hindia Belanda mengupayakan ekonomi politiknya di sektor pertanian.

Mengenai ruang lingkup temporal (waktu), penulis memilih jangka waktu dari tahun 1911-1942. Dalam tahun 1911, terdapat upaya Pemerintah Hindia

---

<sup>18</sup> *Terjemahan Memori Van Overgave Controlier Bone Riattang tahun 1912-1915, Op.Cit.* hlm. 56.

Belanda membentuk tim untuk melakukan studi kelayakan atas potensi wilayah irigasi di Sulawesi Selatan, dan khususnya juga di Bone.<sup>19</sup> Proses pembangunan irigasi tersebut dilakukan secara berjangka hingga tahun 1942, berakhirnya penelitian ini didasarkan pada program pembangunan irigasi modern Pemerintah Hindia Belanda terhenti dilaksanakan, hal itu dipengaruhi oleh pasukan Angkatan Laut Militer Jepang menduduki wilayah Sulawesi dan daerah bawahannya.<sup>20</sup>

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setelah permasalahan pokok diidentifikasi seperti tertuang diatas, maka tujuan penelitian ini memberikan gambaran sebagai berikut;

1. Untuk menguraikan pembangunan irigasi di Bone pada masa pemerintahan Hindia Belanda 1911-1942.
2. Untuk menguraikan pengaruh pembangunan irigasi terhadap perekonomian di Bone 1911-1942.

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah memperkaya historiografi dan referensi pembangunan irigasi di wilayah Bone, Sulawesi Selatan. Selain itu, manfaat praktis dari penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan historis bagi penentu kebijakan terutama terkait dengan pembangunan irigasi. Bukan hanya itu, penelitian ini membuka wawasan masyarakat dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazahah pembangunan irigasi, bagi desa, daerah, dan nasional.

---

<sup>19</sup> J.A.M. van Buuren, *Lot.Cit.*

<sup>20</sup> Anonim, *Citra Sulawesi Selatan Dalam Arsip* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2008), hlm. 19.

#### 1.4. Kajian Pustaka

Razif M. Fauzi, Noer Fauzi Rahman dan Hilmar Farid, yang menulis buku *sejarah/geografi agraria Indonesia*<sup>21</sup>, sebuah kumpulan tulisan yang menarik menjadi rujukan pengantar membaca konsepsi agraria. Mereka mengungkap irigasi yang notabene sebagai salah satu teknologi pertanian dalam tiga arah utama yang ditempuh para sarjana dan pegawai kolonial Belanda melakukan penelitian agraria sejak pertengahan abad kesembilanbelas dalam ruang spasial Hindia Belanda.

Pertama, aspek teknis dari masalah agraria, seperti kesuburan tanah, jenis tanaman, serta teknologi pertanian secara umum. Kedua, hukum agraria, khususnya soal kepemilikan tanah, yang mencakup hukum kolonial dan apa yang disebut hukum adat. Ketiga, ekonomi agraria, yang cukup beragam mulai dari masalah pengerahan tenaga kerja sampai pada kemakmuran (atau sebaliknya kemiskinan) di masyarakat pedesaan.

Ketiga aspek yang diuraikan menjadi pengantar membaca polemik keadaan agraria, yang diakan diejawantahkan membaca masyarakat agraria di Bone. Petunjuk dalam sintesa adalah rambu bagi penulis, menelusuri konsepsi agraria yang dikembangkan dalam teknologi pertanian. Walaupun tidak membahas irigasi dalam konteks spesifik, namun sintensa membangun narasi besar dalam membaca konsepsi agraria, menjadi awal membuka penelusuran pembangunan irigasi di Bone.

---

<sup>21</sup> Razif, M. Fauzi, Noer Fauzi Rahman, Hilmar Farid, *Sejarah/Geografi Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press, 2017).

*Dutch Engineering Overseas: The Creation of a Modern Irrigation System in Colonial Java* adalah buku yang ditulis Wim Ravesteijn.<sup>22</sup> Berdasarkan hasil tulisannya membahas perkembangan irigasi modern di Jawa dalam rangka pembentukan dan transformasi negara jajahan di Hindia Belanda (Indonesia). Wim Ravestijn menganalisis, pemerintah Hindia Belanda telah mengadopsi satu konsep hidrolis dalam proses pembangunan irigasi dengan "sistem teknis besar" yang dibangun antara 1830 dan 1942.

Unsur-unsur penting dalam pembangunan dari Insinyur, pegawai negeri, dan ahli pertanian adalah pembangun sistem utama dan mereka membentuk koalisi khusus yang mempraktikkan pendekatan irigasi hingga ke wilayah koloni baru. Walaupun tulisan ini berfokus dan sentral pada wilayah Jawa, tulisan ini menjadi pengantar bagaimana pemerintah Hindia Belanda sebagai negara berusaha meningkatkan produksi dengan membawa pengetahuan baru di wilayah jajahan dengan menggerakkan tiga unsur pembangun tersebut.

Mudji Hartono menunjukkan analisis yang lebih mendalam dari tulisan Wim Ravesteijn. Tulisan yang berjudul *Realisasi Politik Etis Di Bojonegoro Pada Awal Abad XX*<sup>23</sup> menganalisis suatu wilayah pertanian di Jawa yakni Bojonegoro. Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, wilayah ini seringkali mengalami kemunduran. Upaya perbaikan sistem pertanian menjadi tujuan utama pemerintahan, dengan

---

<sup>22</sup> Ravesteijn, Wim. (2002). *Dutch engineering overseas: The creation of a modern irrigation system in Colonial Java*. Knowledge, Technology & Policy. 14. 126-144. 10.1007/s12130-002-1019-8.

<sup>23</sup> Mudji Hartono, *Realisasi Politik Etis di Bojonegoro pada awal Abad XX: Kajian Sosial Ekonomi*, Edisi Maret 2014, Vol. 14, No.1.

memperbaiki sistem irigasi dan melakukan penyuluhan-penyuluhan pertanian. Terbentuknya sistem irigasi berupa waduk, bendungan, saluran air, dan kanal menggunakan anggaran yang sangat besar. Dampak pembangunan menunjukkan adanya jumlah areal tanam yang dapat diairi bertambah luas. Pembangunan infrastruktur irigasi dan perbaikan sistem irigasi teknis di Bojonegoro jumlahnya cukup banyak dan biayanya pun sangat besar.

Wakidi Karsiwan dan M. Basri membahas hal yang sama dengan konteks wilayah yang berbeda dengan Mudji Hartono, yang berfokus pada wiyah Pringsewu. Tulisan yang berjudul *Pembangunan Irigasi Way Tebu Sebagai Kebijakan Etis Pemerintah Kolonial Belanda di Pringsewu Tahun 1927* merupakan tulisan yang spesifik membahas rencana pembangunan irigasi didaerah pengembangan kolonisasi pringsewu. Berdasarkan hasil temuannya, pada tahun 1917, Pekerjaan penelitian irigasi mulai dikerjakan di bawah pimpinan ahli seorang insinyur dari pekerjaan umum di Teluk Betung. Pekerjaan itu mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan, dari pemetaan, pengukuran dan survei lokasi-lokasi yang memiliki cadangan air (sungai) yang memadai untuk dijadikan sumber irigasi, survei dan pada tahun 1926 dilakukan pengukuran debit air oleh jawatan irigasi. Pembangunan jaringan irigasi ini dilakukan dengan kerja rodi, dasar kerja rodi diatur dalam peraturan pemerintah. Pengerjaan proyek pembangunan irigasi tersebut diawasi oleh pejabat pemerintah yakni kepala desa.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Karsiwan, Wakidi, Muhammad Basri, *Pembangunan Irigasi Way Tebu Sebagai Kebijakan Etis Pemerintah Kolonial Belanda di Pringsewu Tahun 1927*. Pesagi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, Vol, 1. No. 3 (2013).

Inovasi teknologi masyarakat tradisional dalam penelitian Linton mengenai peralihan pertanian ladang ke pertanian sawah di suku Betsiko, Madagaskar. Inovasi teknologi pertanian adanya sistem irigasi, menyebabkan perubahan dalam suku tersebut. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah diterimanya irigasi, tidak lagi memerlukan kerjasama keluarga (komunal). Masyarakatnya mampu mandiri dan mengelola persawahannya. Beberapa keluarga mulai berpindah dan bermukim, mencari dan membuat lahan persawahan baru, desa tidak mencukupi lagi. Mobilitas ini menyebabkan terbentuknya desa-desa baru.<sup>25</sup> Perubahan ini, misalnya kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa menekan biaya produksi. Di samping itu, ada pula orang-orang yang menggunakan penemuan baru tersebut untuk memodernisasi cara produksi dan harus didukung pula dengan adanya kelompok masyarakat yang menciptakan investasi untuk meningkatkan produktivitas.<sup>26</sup>

Lebih jelasnya Nahdia Nur, dalam tulisan tesis di Universitas Gadjah Mada berjudul *Produksi dan pemasaran beras di Sulawesi Selatan 1900-1943*<sup>27</sup>. Tulisan tersebut mengulas irigasi, tetapi prosesi pembangunan irigasi tidak terlalu mendalam dibahas secara komprehensif di Bone, sehingga penulis menemukan gap untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Lebih menariknya tulisan lain dari

---

<sup>25</sup> Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Bina Aksara, 1997, hlm. 217-218.

<sup>26</sup> Sadono Sukirno, *Lot. Cit.*

<sup>27</sup> Nahdiah Nur, *Produksi dan Pemasaran Beras di Sulawesi Selatan 1900-1943*, Yogyakarta: Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2003.

Nahdia Nur, sebuah Disertasi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 yang berjudul *Jejaring Perdagangan dan Integrasi Ekonomi: Sejarah Ekonomi Sulawesi Bagian Selatan 1900-an-1930-an*.<sup>28</sup> Perdagangan beras merupakan salah satu corak produksi Sulawesi Selatan. Pengadaan sarana dan prasarana untuk memperlancar arus produksi dan distribusi diupayakan mendukung jaringan perdagangan pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Poin utamanya menunjukkan sektor pertanian menjadi basis ekonomi kerakyatan yang perlahan diintegrasikan dalam perdagangan kerajaan dan kolonial di Sulawesi Selatan.

Dari sudut pandang berbeda, Rasyid Asba dalam bukunya *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik dan Regional di Indonesia*.<sup>29</sup> Periode tahun 1900-1920 perdagangan kopra di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dan penurunan dipengaruhi perang dunia pertama, sehingga upaya lain pemerintah Hindia Belanda mendukung menjaga pemasukan kas dengan mengalihkan perhatiannya pada usaha perberasan, dengan usaha membangun irigasi. Walaupun penekanan tulisan ini pada perkembangan komoditas kopra, tetapi melihat upaya lain selama penurunan intensitas perdagangan tersebut. Dukungan investasi *De Javasche Bank* sebagai pendukung dalam proyek-proyek nasional pembangunan irigasi pada kurun tahun penelitian tersebut.

---

<sup>28</sup> Nahdia Nur, *Perdagangan dan Ekonomi di Sulawesi Selatan, pada tahun 1900-an sampai dengan 1930-an*. Yogyakarta: Disertasi Sejarah Universitas Gadjah Mada, 2016.

<sup>29</sup> Rasyid, Asba, *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik dan Regional di Indonesia*, 2007.

Suriadi Mappangara dalam disertasi yang berjudul Kerajaan dan Bangsawan Bone, di Tengah Perubahan Rezim 1811-1946<sup>30</sup> merupakan sebuah tulisan penting melihat struktur sosial masyarakat yang berpengaruh dalam masyarakat Bone. Posisi bangsawan begitu vital dan berpengaruh dalam kebutuhan pemerintahan kolonial, upaya tersebut menjadikan struktur masyarakat tradisional sebagai basis penggerak dalam sistem tenaga kerja dalam proses pembangunan infrastruktur seperti irigasi. Tulisan ini melihat struktur sosial masyarakat Bone, walaupun tidak mengungkapkan pembangunan irigasi, tetapi gambaran kondisi sosial-politik yang terjadi di Bone pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Secara umum tulisan Razif M. Fauzi, Noer Fauzi Rahman dan Hilmar Farid secara garis besar membuka konsepsi dalam memetakan penelitian sejarah agraria. Tulisan Wim Ravestijn, Mudji Hartono, dan Karsiwan, Wakidi, Muhammad Basri menunjukkan variabel penting contoh kasus dari gambaran pembangunan irigasi di Jawa secara spesifik dan kompleksitasnya dalam pembentukan Negara Kolonial Hindia Belanda. Sedangkan Tulisan Nahdia Nur, Rasyid Asba dan Suriadi Mappangara yang mengulas Bone dalam berbagai sisi sudut pandang membuka analisis dalam penggambaran dalam penelitian irigasi ini. Namun dalam penulisan yang mendalam irigasi di Bone tersebut, tidak diulas mendalam, dan membuka gap penelitian baru yang perlu ditelaah lebih mendalam meramu kerangka dan metodologi penelitian.

---

<sup>30</sup> Suriadi Mappangara. Kerajaan dan Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim 1811-1946. Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

## 1.5. Kerangka Konseptual dan Pendekatan

Menurut Olivia Aubriot, irigasi dapat dilihat sebagai elemen fisik yang disalurkan ke tanaman melalui teknologi atau sebagai aset ekonomi yang dimobilisasi untuk meningkatkan produksi pertanian.<sup>31</sup> Berbicara soal irigasi, tentu berkaitan erat dengan ekonomi pedesaan yang bercorak agraris seperti di wilayah Bone. Kuntowijoyo menguraikan ekonomi pertanian menggunakan pendekatan sejarah pedesaan ditinjau dari beberapa bagian seperti aspek bangunan fisik, satuan sosial, lembaga sosial, hubungan sosial, serta psiko-kultural.

Menurut Kuntowijoyo, Bangunan fisik seperti irigasi memberikan dampak terhadap hubungan petani dengan golongan bukan petani, gambaran tersebut berubah-ubah pada setiap fase modernisasi, terutama mengenai masalah praktik, material, politik, dan kultural pada satu pihak, serta hubungan-hubungan sosial pada pihak lain. Kedua aspek itu bertalian erat dengan ekonomi desa yang dalam sistem feodalistis serta teknologi primitif terutama terbatas pada produksi subsisten saja. Munculnya modernisasi teknologi pertanian, organisasi ekonomi petani mengalami perubahan; disini produksi ditujukan kepada penjualan ke pasar tradisional, regional dan internasional.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Olivia Aubriot, *The History and Politics of Communal Irrigation: A Review*, *Water alternatives*, 2022, 15 (2), pp.307-340, hlm. 308.

<sup>32</sup> Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. hlm. 81-86

Secara struktur, perangkat fisik dalam sistem irigasi, terdiri dari bendung (*watervang*), ledeng (*leiding*) dan saluran kanal.<sup>33</sup> Perangkat ini adalah satu-kesatuan jaringan terciptanya sistem bangunan hidrolik. Coward<sup>34</sup> menjelaskan proses “penciptaan bangunan hidrolik”, menguraikan hubungan antara hak atas air dan investasi dalam penciptaan jaringan irigasi (diikuti dengan pembaruan hak atas air melalui investasi pada pemeliharaan). Dengan kata lain, investasi dalam pembangunan suatu jaringan diakui mempunyai hak atas bagian tertentu atas air dan dengan demikian dianggap sebagai pemegang sah atas hak atas air tersebut. Hubungan penting ini mendukung sistem irigasi yang dikelola sendiri dan, dalam jangka panjang, menjelaskan penegasan hak, pemeliharaan infrastruktur, dan penguatan organisasi.<sup>35</sup>

Irigasi sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Bukan tak lain jalan untuk mencapai tersebut dengan jalan pembangunan fisik. Menurut Soerjono Soekanto, pembangunan diidentifikasi melalui beberapa tahap, dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap perencanaan dilaksanakan

---

<sup>33</sup> Ruslan Wirasoedarmo, *Teknik Irigasi Permukaan*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 87-88.

<sup>34</sup> Coward, E.W. 1986. *Direct or indirect alternatives for irrigation investments and the creation of property*. In Easter, K.W. (Ed), *Irrigation investment, technology, and management strategies for development*, pp. 225-244. *Studies in water policy and management* No. 9. Boulder: Westview Press.

<sup>35</sup> Olivia Aubriot, *The History and Politics of Communal Irrigation: A Review*, *Water alternatives*, 2022, 15 (2), pp.307-340, hlm. 109.

menyerap aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik.<sup>36</sup>

Pembangunan dikatakan berhasil apabila produktivitas masyarakat meningkat, disertai efisiensi pelaksanaan usaha pembangunan, dan peningkatan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Kenaikan produktivitas disektor pertanian akan memperluas pasar dari berbagai bidang industri. Kenaikan pendapatan petani akan memperluas pasar industri barang-barang konsumsi, dan kenaikan produktivitas pertanian akan memperluas pasar industri-industri penghasil input pertanian modern. Kenaikan pendapatan disektor pertanian dapat pula menjadi sumber biaya untuk pengeluaran pemerintah, yaitu dengan mengenakan pajak atas sektor pertanian.

Menurut Sadono, investasi pembangunan prasarana memiliki tiga ciri khusus: masa pembangunan dan hasil pembangunan sangat panjang, pembangunan membutuhkan anggaran yang besar, dan manfaat dirasakan semua masyarakat. Pembangunan dan pengembangan prasarana tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintahan. Selain itu, kemampuan suatu negara dalam mengerahkan sumber-sumber modal dalam negeri berimplikasi kenaikan terhadap kas negara.<sup>37</sup>

Menurut Bert F. Hoselitz merumuskan faktor-faktor non-ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi membutuhkan anggaran kas yang besar, modal perbankan,

---

<sup>36</sup> Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm.3-5

<sup>37</sup> Sadono Sakirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985, hlm. 104-107.

tenaga ahli serta tenaga terampil. Tenaga terampil yang dimaksud adalah tenaga kewiraswastaan, administrator professional, insinyur, ahli ilmu pengetahuan, dan tenaga manajerial yang terampil.<sup>38</sup> Dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana irigasi dibutuhkan komponen insinyur, pemerintah dan penyuluh pertanian.

Setelah Bone mengalami imperialisme modern pada awal abad ke-20.<sup>39</sup> turut diwarnai modernisasi di sektor pertanian. Modernisasi pertanian berupa irigasi diperuntukkan agar menghasilkan panen yang maksimal. Proses modernisasi seperti itu dialami pula oleh petani, dimulai sejak periode kolonial. hubungan masyarakat tradisional dipolakan menurut tradisi besar dan tradisi kecil, selama zaman kolonial menunjukkan sifat dualistis dalam aspek ekonominya yang menonjolkan jarak besar antara pedesaan dan kota. Dengan usaha modernisasi, jarak antara masyarakat desa dengan perkotaan diperkecil, pengaruh dari sistem politik modern masyarakat pedesaan kearah partisipasi dalam kehidupan nasional.<sup>40</sup>

Terintegrasinya Bone kedalam politik ekonomi kolonial tersebut tidak lain adalah upaya pertumbuhan ekonomi yang diupayakan Pemerintah Hindia Belanda. Menurut Menurut Thomas Lindblad bahwa ekonomi luar Jawa dan Madura baru meningkat pesat pada awal abad XX, itu semua disebabkan oleh terintegrasinya dengan pasar dunia. Menurutnya bahwa pengaruh integrasi ekonomi luar Jawa

---

<sup>38</sup> Adon Nasrullah Jamaluddin, *Op.Cit.*, hlm. 56-57.

<sup>39</sup> Gallagher, John dan Ronald Robinson, *The Imperialism of Free Trade*” dalam *The Economic History Review* 6, No. 1, 1953, hlm. 1-15.

<sup>40</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm 188-189.

dengan pasar dunia, jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan integrasi ekonomi antara pulau di wilayah Hindia Belanda. Thomas menambahkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada waktu itu, *Pertama*, cepatnya pertumbuhan penduduk pribumi, *kedua* tingginya ekspor perkapita dan yang *ketiga* kuatnya hubungan ekspor dan impor.<sup>41</sup>

Peneliti membatasi bahwa salah satu hal dalam perkembangan dan pembangunan irigasi di sektor ekonomi. Bagaimana kondisi masyarakat setelah dibangunnya irigasi. Secara spesifik, irigasi yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pribumi dan pemerintah kolonial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pertanian di *afdeeling* Bone sebelum dan sesudah dibangunnya irigasi.

## 1.6. Metodologi Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian sejarah; heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.<sup>42</sup> Sebagian besar sumber merupakan keterangan tertulis yang diperoleh dari gambaran sejarah kolonial. Dalam proses heuristik, tahap paling awal mengumpulkan sumber-sumber tertulis, yang menguraikan tentang pertanian, Bone, irigasi, dan Pemerintah Hindia Belanda.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>J.Th. Lindblad, *Het Belang van de Buitengewesten: Economische Expansie en Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indie, 1870-1942*, Amsterdam: Neha 1989.

<sup>42</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018, hlm. 69

<sup>43</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 55.

Pada awal-awal penelitian, pencarian sumber ini dilakukan dengan beragam bentuk dari dokumen arsip, majalah, buku, jurnal, artikel, peta, artefak, dan foto. Pertama, penelitian ini berfokus menelusuri sumber pustaka yang membahas pertanian di Sulawesi Selatan, dan spesifik spasial di Bone. Perpustakaan Universitas Hasanuddin (Makassar), Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Laboratorium Sejarah dan Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah, Perpustakaan Pribadi Dosen (Dr. Suriadi Mappangara, Dr. Ilham dg. Makkelo) dan Perpustakaan pribadi penulis. Beruntung tulisan mengenai pertanian di Sulawesi Selatan telah banyak di kaji, walaupun setelah menelusuri lebih dalam uraian tulisan tersebut, bahan-bahan yang membahas irigasi masih sedikit diuraikan.

Beruntung pada masa kolonial, Bone merupakan wilayah yang diperhatikan kolonial. Hal ini dibuktikan dalam kumpulan arsip-arsip yang diperoleh dari Nationaal Archief ([nationaalarchief.nl](http://nationaalarchief.nl)), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI, Jakarta), dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai dokumen Memori serah terima jabatan (*Memorie van Overgave*) Pemerintahan kolonial di Bone dan Sulawesi Selatan banyak membahas wilayah Bone, tetapi dalam proses pencarian bahan-bahan yang membahas irigasi sangat sedikit dan tidak spesifik diungkapkan. Bahasan yang secara umum, hanya diulas pembangunan-pembangunan di daerah yang dibangun di Bone.

Selain itu, data-data majalah juga ditelusuri dilaman delpher, [archive.org](http://archive.org), [dbnl.nl](http://dbnl.nl), hanya beberapa catatan temporal menguatkan Bone difokuskan sebagai

wilayah irigasi. Data-data ini telah membuka gambaran pembandingan dengan arsip yang telah ditemukan. Temuan seperti foto bendung, sungai, dan kondisi pelabuhan, ditelusuri dari laman [Collectie.wereldculturen.nl](http://Collectie.wereldculturen.nl), [tropenmuseum.nl](http://tropenmuseum.nl) dan [Oxis.org](http://Oxis.org). Temuan itu menjadi bagian membaca geografis visual yang sezaman dengan temporal penelitian.

Setelah sumber-sumber telah didapatkan, kemudian dianalisis lebih mendalam isi yang dimuat, dikomparasikan antara satu fakta dengan fakta yang lain, sehingga menghasilkan pandangan-pandangan baru dan mengurangi trial error dalam penulisan ini. Hasil analisis tersebut disusun dan diseleksi melihat konteks irigasi yang saling berhubungan dan fakta-fakta yang diperoleh. Setelah data diinterpretasi, diakhiri dengan tahapan historiografi. Tahapan ini menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk penulisan sejarah yang sistematis.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam karya tulis ini terbagi dalam lima bab. Bab pertama sebagai pendahuluan yang di dalamnya diuraikan latar belakang, batasan dan rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan pendekatan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan mengenai pentingnya penulisan tesis ini dan bagaimana penelitian dijelaskan pada bab pertama.

Pada bab kedua merupakan bab yang membahas masyarakat pertanian di Bone. Terdiri dari sub bahasan Bone dibawah penguasaan kolonial di Bone 1905, kondisi sosial ekonomi masyarakat pertanian, dan kondisi pertanian di masa peralihan di Bone.

Bab tiga, Irigasi di Bone 1911-1942. Pada bab ini menguraikan irigasi sebagai pendekatan politik, studi kelayakan, pembangunan irigasi 1911-1942, dan operasi dan pemeliharaan irigasi. Bab ini lebih menekankan keberadaan irigasi dari proses perencanaan hingga terbentuknya jaringan operasi dan pemeliharaan irigasi.

Pada bab keempat, menguraikan pengaruh irigasi terhadap perekonomian di Bone. Upaya memaparkan lebih spesifik, penulis menguraikan perkembangan pertanian, kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bone pasca irigasi, dan pengaruh irigasi terhadap perekonomian di Bone.

Pada bab kelima merupakan bab yang menguraikan kesimpulan penelitian.

## **BAB II**

### **MASYARAKAT PERTANIAN DI BONE**

Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat di Bone. Secara ringkas, gambaran masyarakat pertanian di Bone ini akan diuraikan pada bab ini. Ulasan pengantar ini menjadi gambaran pengantar pembangunan irigasi mendapatkan ruang dalam dinamika pemerintahan Hindia Belanda. Bab ini akan menguraikan Bone dibawah penguasaan Pemerintah Hindia Belanda<sup>1</sup> masyarakat pertanian dan kondisi sosial-ekonomi di masa peralihan dan kondisi pertanian di masa peralihan.

#### **2.1. Bone Dibawah Penguasaan Kolonial**

Pada masa Gubernur Jenderal J.B. van Heutz pada tahun 1904 satu kebijakan baru arah perdagangan daerah jajahan yang lebih intensif, dengan tujuan pokok menguasai secara langsung seluruh wilayah jajahan. Keinginan ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan C.W. Margadant – bahwa “Raja-Raja Bumiputera bukanlah kekuasaan asing, melainkan pemerintah bumiputera berpemerintahan sendiri dan bebas dalam wilayah kekuasaan Belanda, yang mengakui kedaulatan Ratu Belanda dan vasalnya...”. Pada tahun 1904, Gubernur Jenderal B. Van Heutz mengambil suatu tindakan represif dengan solusi penaklukan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Kekuasaan Makassar 1905-1942* (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 83.

<sup>2</sup> Ketut Ardhana, *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 89-91.

Keinginan yang kuat tersebut dilandasi oleh berbagai landasan seperti halnya pada daerah-daerah lainnya di Indonesia bahwa perluasan kekuasaan itu dilakukan dengan maksud Belanda berusaha menciptakan keamanan dan ketentraman untuk menjamin keberhasilan dari usaha-usaha penanaman modal swasta, menguasai tanah yang potensial untuk usaha pertanian, perkebunan dan pertambangan dalam rangka memperluas usaha penanaman modal swasta, dan mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya di kerajaan-kerajaan di luar Jawa.<sup>3</sup>

Rencana strategis penaklukan kolonial mengirimkan pasukan militer menaklukan kerajaan-kerajaan sekutu di Sulawesi Selatan pada tahun 1905. Pemerintah Hindia Belanda menggunakan kekuatan militernya berusaha memerangi kerajaan-kerajaan, baik yang merdeka maupun terikat dengan perjanjian persahabatan atau telah tunduk pada kekuasaan Hindia Belanda. Berdasarkan surat resmi dari J.B. van Heutsz kepada C.A. Kroesen agar semua penguasa-penguasa bumi putra untuk mengakui kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dengan menandatangani Pernyataan Pendek (*Korte Verklaring*) dalam waktu yang singkat.

Sasaran pertama dalam politik tersebut di Sulawesi Selatan adalah kerajaan Bone.<sup>4</sup> Kerajaan Bone merupakan salah satu kerajaan yang besar dan berpengaruh

---

<sup>3</sup> Edward L. Poelinggomang, dkk., *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, (Makassar: Balitbangda, 2005), hlm. 14.

<sup>4</sup> *Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Rittang Tahun 1912-1915*, Bidang Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015, hlm. 49.

pada perpolitikan di Sulawesi Selatan pada abad ke-20. Pemerintah Hindia Belanda pertama-tama melakukan negosiasi dengan mengirimkan rombongan pasukannya ikut serta bersama Brugman, *Controleur* Goedhart, *Cramer* (Jurubahasa) ke kerajaan Bone. Mereka tiba di Pelabuhan Bajoe pada tanggal 22 Juni 1905 dengan membawa surat tuntutan kepada Raja Bone. Isi surat tersebut memperbolehkan Pemerintah Hindia Belanda menempatkan wakilnya untuk mengatur, mengawasi dan memungut pajak di Pelabuhan Pallime. Selain itu pula diajukan satu kontrak baru berupa pernyataan pendek untuk diperiksa, diteliti dan harus pula ditandatangani.<sup>5</sup>

*Arumponé La Pawawoi* dan seluruh Dewan Adat kerajaan membahas isi surat itu, dan memutuskan untuk menolak segala tuntutan yang diajukan. Pada tanggal 29 Juni 1905 Pemerintah Kerajaan Bone memberi jawaban yang intinya menolak seluruh keinginan dari Pemerintah Hindia Belanda. Penolakan itu didasarkan atas kedua pelabuhan tersebut merupakan sumber utama pendapatan (tulang punggung) bagi Kerajaan Bone. Keberadaan sarana pelabuhan Pallime dan Bajoe telah menopang kebutuhan ekspor beras Kerajaan Bone ke Indonesia Timur. Potensi pelabuhan inilah yang menjadi target kolonial ingin menguasai perekonomian Bone.

Pada dini hari 28 Juli 1905, pasukan didaratkan dan diiringi dengan dentuman-dentuman penembakan dari kapal perang Belanda. Pasukan Bone tidak dapat membendung serangan tersebut, dan perang dahsyat pun terjadi. Perseteruan

---

<sup>5</sup> Edward L. Poelinggomang, 2004, *Op.Cit.*, hlm. 46.

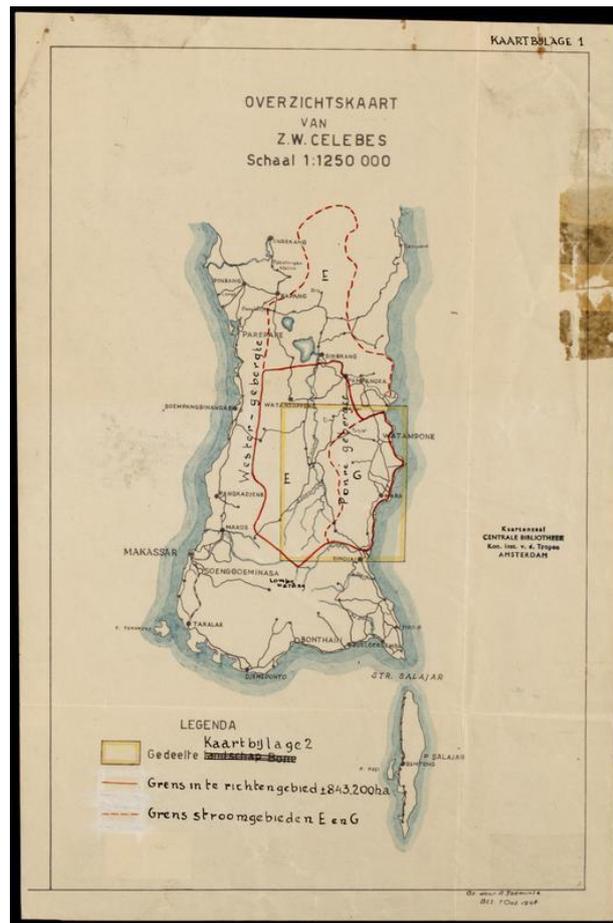
antara kerajaan Bone dan Pemerintah Hindia Belanda terus berlanjut, Pasukan Bone kalah dan membuat La Pawawoi Karaeng Segeri harus mengungsikan diri wilayah bagian (*palili*) Pitumpanua, tetapi Kerajaan Bone mengalami kekalahan ditandai dengan terbunuhnya Panglima Besar Kerajaan Bone, Abdul Hamid Petta Ponggawae. Kematian tersebut mengakhiri pelarian *Arumponé* La Pawawoi Karaeng Segeri di Awo (Pitumpanua). Hal ini mengindikasikan bahwa Kerajaan Bone tidak mau tunduk dan mengakui kekuasaan Belanda serta menandatangani pernyataan pendek. Setelah Bone takluk, Pemerintah Hindia Belanda tidak banyak mengalami kesulitan untuk memaksa para penguasa-penguasa kecil lainnya untuk menerima dan menandatangani pernyataan pendek.<sup>6</sup>

Setelah penaklukan, pemerintahan kolonial yang bersifat sipil militer mulai melakukan berbagai pembaharuan dalam berbagai bidang, di bidang politik pemerintahan, perubahan dalam pengaturan tanah dan kepemilikan, serta perubahan infrastruktur di wilayah Sulawesi Selatan. Perubahan-perubahan itu didasarkan pada tujuan penguasaan dan dominasi (monopoli) perdagangan untuk kepentingan ekonomi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>7</sup> Thamrin Mattulada, *Kuasa Penjajah: Imperialisme Belanda di Kerajaan Bone 1906-1931* (Makassar: Pustaka Sawerigading bekerjasama Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015) hlm. 78-79.



**Peta 1. Gambaran Umum Dari Sulawesi Bagian Barat Daya, Tahun 1921**  
 Sumber: Koleksi digital Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), 1921.

Setelah keberhasilan penaklukan aksi militer yang dilancarkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, penaklukan telah mengubah keseluruhan peta politik di Sulawesi Selatan. Wilayah Sulawesi Selatan dijadikan satu wilayah pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahan (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). Berdasarkan peta 1 tentang wilayah Sulawesi Selatan, Wilayah itu dibagi ke dalam tujuh bagian pemerintahan (*Afdeeling*) yaitu:

Makassar, Bonthain, Bone, Pare-Pare, Luwu, Mandar, dan Buton dan Pesisir Timur Sulawesi.<sup>8</sup>

Wilayah Bone telah diatur tunduk, patuh di bawah kuasa kolonial. Wilayah Bone menjadi bagian dari administratif pemerintah Hindia Belanda pada Gubernemen Sulawesi dan daerah bawahannya (*Celebes en Onderhoorigheden*).<sup>9</sup> Berdasarkan catatan historis, daerah bekas kekuasaan Kerajaan Bone di masa Pemerintahan Hindia Belanda dipecah menjadi tiga Onderafdeeling yaitu *Onder Afdeling* Bone Utara, Bone Selatan dan Bone Tengah.<sup>10</sup> Wilayahnya dibagi menjadi beberapa cabang Pemerintahan (*Onder Afdeling*) dan membentuk bagian Pemerintahan (*Afdeeling*). Wilayah *afdeeling* Bone terbagi menjadi wilayah *onderafdeeling*, diantaranya Bone, Bone utara, Bone selatan, Soppeng dan Wajo. Pusat Pemerintahannya awalnya ditempatkan di Pompanua, kemudian dipindahkan di Watampone.<sup>11</sup>

Bentuk Pemerintahan di wilayah Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahan setelah usaha penguasaan keseluruhan daerah di Sulawesi Selatan dan Tenggara adalah bentuk Pemerintahan sipil-militer.<sup>12</sup> Pengaturan wilayah Pemerintahan pada masa antara tahun 1906-1910 ini dipandang masih bersifat

---

<sup>8</sup> Edward, L. Poelinggomang, 2004, *Op.Cit.*, hlm. 83-84.

<sup>9</sup> *Ibid.*; Thamrin M. Mattulada, *Op.Cit.*, hlm.80-81.

<sup>10</sup> *Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang 1912-1915.*, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>11</sup> M. Van Rhijn, *Nota van Toelichting Betreffende Het Landschap Bone, Nationaal Archief*, 1931.

<sup>12</sup> Edward L. Poelinggomang, *Op.Cit.*, hlm. 96.

sementara. Gubernur H. N. A. Swart (1906-1908), menjadikan wilayah-wilayah Kerajaan di Sulawesi Selatan dan Tenggara diatur langsung dalam pengawasan Pemerintahan Sipil Militer Hindia Belanda. Tupoksi Pemerintahan ini masih bersifat sementara dan penanggung jawab kekuasaan adalah orang-orang militer yang turut menjadi pioner pendudukan.<sup>13</sup>

Dengan demikian, daerah-daerah ini menyediakan dan memberikan lapangan baru kekuasaan dan pemerintahan.<sup>14</sup> Pemerintahan Hindia Belanda mulai menata sistem administrasi dan wilayah pemerintahan serta mereformasi dengan gaya penerapan hukum modern (Kolonial) di Bone. Wilayah Kerajaan Bone dahulu, di masa Kolonial dibagi menjadi dua cabang Pemerintahan yang diberikan status *onderafdeeling*, yakni Bone dan Bone ri Attang (Bone Selatan). Pengaturan ini tidak dapat dilepaskan dari wilayah Gubernemen (*Gouvernement*). Gubernur di wilayah taklukan Sulawesi Selatan menyiapkan persiapan penyatuan Pemerintahan langsung di Gubernemen.<sup>15</sup>

Pemerintahan Sulawesi dan daerah bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*) diatur secara bertingkat ke bawah, mulai dari Gubernur (*Gouvernement*), bagian Pemerintahan (*Afdeeling*), cabang Pemerintahan (*Onder*

---

<sup>13</sup> Pengaturan ini didasarkan pada surat keputusan Gubernur H. N. A. Swart (1906-1908), tertanggal 31 Desember 1906, No. 6041/2. Lihat Edward L. Poelingomang, *Ibid*, hlm. 88-89.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>15</sup> *Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang 1912-1915.*, *Op.Cit.*, hlm. 49-51.

*Afdeeling*), daerah adat (*Adat Gemeenschap*) sampai tingkat kampung.<sup>16</sup> Pelaksanaan Pemerintahan dan kekuasaan di wilayah cabang Pemerintahan (*Afdeeling*) kepada Asisten Residen. Ia berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur (*Gouverneur*) serta dibantu juga dengan seorang Aspiran Kontrolir (*Adspirant-Controleur*) dan seorang Juru Tulis. Jabatan ini membawahi beberapa Kontrolir yang ditempatkan di cabang Pemerintahan (*Onder Afdeeling*).

Kolonel C. Van Loenen selaku komandan Ekspedisi Militer ditunjuk menjadi *Waarnemen Asisten Residen* Bone. Kolonel C. Van Loenen diamanahkan untuk mengatur dan menyesuaikan pengaturan administrasi dari arahan dari Gubernur Swart. Wilayah Pemerintah di Bone diatur berdasarkan tata administrasi kolonial. Lebih jelasnya gambaran tersebut dilihat pada peta 2, wilayah *Afdeeling Bone*. *Afdeeling* ini mengawasi *Onderafdeeling* Bone, Bone Riattang, Soppeng dan Wajo.<sup>17</sup>

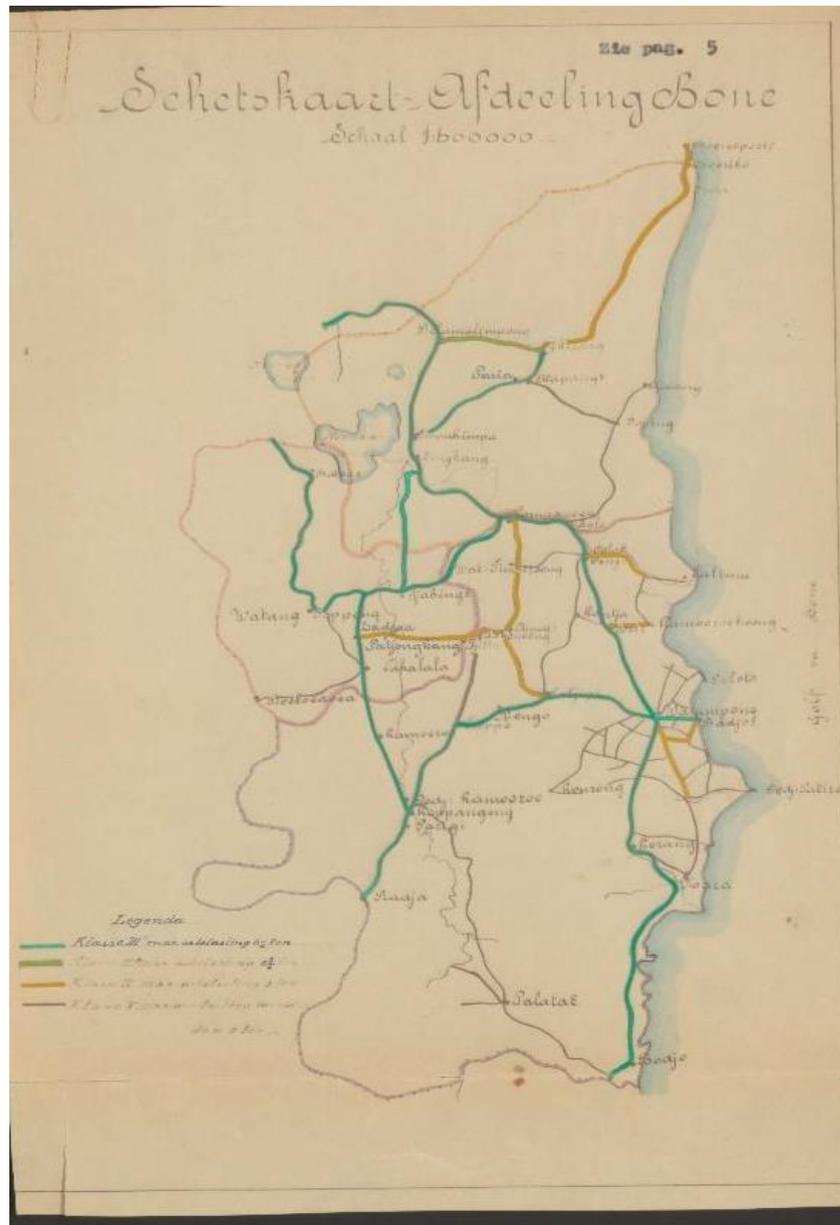
Wilayah Bone dibagi ke dalam beberapa *distrik*, pada tahun 1906-1916 pembagian setiap Distrik di *Onderafdeeling* Bone (utara dan tengah) dan *Onderafdeeling* Bone *ri-Attang* (Bone Selatan) di bagi menjadi 23 Distrik. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menata sistem administrasi Pemerintahan dengan cara membagi wilayah ke dalam beberapa distrik dan onderdistrik. Wilayah Bone Tengah dan Utara dibagi menjadi 16 distrik, yaitu Watampone, Awangpone,

---

<sup>16</sup> Edward L. Poelinggomang, *Op.Cit.*, hlm. 84.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Palakka, Tanete-Riawang, Cenrana, Sailong, Timurung, Amali, Ulawang, Ponre, Barobo, Cina, SibuluE, Beengo, Lamuru, Attang Lamuru. Sedangkan 7 distrik berada *Onderafdeeling Bone ri-Attang* menjadi, yakni Mare, Tonra, Salomekko, Kajuara, Kahu, Libureng dan Cani.



**Peta 2. Wilayah *Afdeeling Bone* Tahun 1935.**

**Sumber:** W.E.G. Veen, (assistent-resident); *Memorie van Overgave van de afdeling Bone*, 1935, Nationaalarchief.nl, hlm 108.

Usaha kolonial dalam menata struktur Pemerintahan mengalami banyak hambatan. Penggabungan beberapa daerah bekas Kerajaan menjadi satu distrik tetap menimbulkan banyak masalah, terutama dalam menggalang persatuan dari setiap distrik. Setiap wanua atau wilayah yang dulunya dipegang oleh seorang Arung yang tentu saja berasal dari wilayah itu secara turun temurun, sudah mengalami perubahan, pengaturan jabatannya diatur dan diawasi oleh Pemerintah Kolonial.<sup>18</sup>

Di bawah Pemerintahan Kolonial langsung terdapat posisi kepala distrik, di bawah kepala distrik langsung terdapat kepala *onderdistrik*, dan bawah mereka adalah para kepala yang berada dibawahnya lagi, yaitu kepala banua dan kepala kampung. Pada bagian distrik masing-masing kepala distrik dan *onderdistrik* memakai gelar *Arung* atau *Sulawatang*, kepala wanua atau kampong menyandang gelar *Matoa*, *Kapala*, *Mado*, *Anreguru*, *Pabbicara*, *Sulewatang*, *Arung*, *Jannang*, *Pawang*, *Mandanreng*, *Gala*, *Dan Mengepa*.<sup>19</sup>

Para kepala kampung ini dengan persetujuan pemerintah, dibantu oleh *Paranung* atau *Sareang* (penyuluh atau pembawa pesan) yang langsung bertanggungjawab kepada kepala kampung.<sup>20</sup>Pengangkatan dan pemutusan hubungan kerja dengan para kepala, menurut peraturan yang berlaku kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para kepala yang lebih rendah posisinya

---

<sup>18</sup> Dalam keputusan *Asisten Residen Bone* No. 229 dan 223 dan tanggal 10 Juli 1906 No.287 membentuk distrik-distrik. *Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang 1912-1915.*, *Op.Cit.*, hlm. 135-138.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 141.

berada ditangan Pemerintahan *Afdeeling*.<sup>21</sup> Pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan harus mendapat persetujuan Gubernur atau Asisten Residen, hal ini berkaitan dengan kepala distrik atau onderdistrik atau kepala-kepala yang lebih rendah kedudukannya, jadi kepala banua atau kampung. Dari pihak pemerintah hanya perlu dijaga bahwa pemilihan seorang kepala harus dilaksanakan dengan jujur dan bahwa jumlah anggota pengurus kampung.

Selain itu, jabatan-jabatan wilayah adat yang sejak dahulu dilakukan pemilihan tetap dipertahankan, namun pemilihan itu tidak boleh memiliki tujuan lain, selain pemilihan seorang calon kepala. Jabatan ini juga dapat berlanjut melalui garis keturunan perempuan. Apalagi tertua tidak berhak secara mutlak atas gelar tersebut. Karena pengangkatan dari pejabat yang baru selalu dilakukan berdasarkan pemilihan, di mana pada umumnya pemilihan ini dilaksanakan oleh *Hadat*, dengan memperhatikan keinginan *Petta Mangkau* (Raja yang berkuasa).

Meskipun dahulu, sesuai dengan adat Bugis para wanita juga diberi jabatan pemerintahan, namun setelah kedatangan Belanda, secara berangsur-angsur jabatan-jabatan di daerah ini hanya dipegang oleh kaum lelaki. Tidak ada lagi usulan untuk mengangkat kepala-kepala Pemerintahan perempuan, sementara para *arung* wanita yang menjabat fungsi Pemerintahan yang berlangsung sejak zaman kerajaan Bone kini digantikan fungsinya oleh suami atau anak laki-lakinya. Beberapa *arung* wanita masih memiliki gelar mereka dan masih memperoleh

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 57.

pendapatan dari tanah ornamen, seperti *Aru Ajalirang*, *Aru Teko*, *Aru Malle*, *Aru Cinnong*, *Aru Lalidong*, *Aru Kalibong*, *Aru Patuku* dan *Aru Pacieng*.

Para anggota Pemerintahan *Onderafdeeling*, kepala distrik dan sejumlah kepala *onderdistrik* menerima gaji/tunjangan tetap dari kas *landschap*. Penggajian ini ditetapkan sesuai dengan azas-azas yang ditetapkan pemerintah mengenai hal itu, dimana diusahakan bahwa jumlah penggajian itu kurang dari ½ bagian dari total anggaran kas *landschap*. Selain gaji dan tunjangan tetap tersebut, para kepala tersebut diatas juga dibiarkan tetap memiliki pendapatan yang berasal dari kepemilikan tanah *ornamen* mereka (tanah jabatan, kebun, *sero*, empang, dan sebagainya).<sup>22</sup> Pengangkatan para kepala kampung semuanya memiliki acuan pengangkatan, terbit surat keputusan disetujui oleh Pemerintah Kolonial.

Berdasarkan kontrak Sulawesi (*Celebes*) tahun 1904 mengenai keharusan pembesar-pembesar di wilayah ini mengenai urusan pajak.<sup>23</sup> Para kepala distrik yang memiliki tugas untuk memungut pajak *sima assapareng atuwong*, serta yang pada dasarnya harus mempertanggung-jawabkan uang ini secara langsung kepada kolektor (pengumpul) pajak, menerima masing-masing 8% dari jumlah yang mereka setor sebagai jasa pemungutan.

Para kepala juga menerima sedikit pendapatan dari jasa palawatan (hadiah uang pada saat perkawinan). Kepala wilayah ini memiliki *Paranuang* dan *sareang*,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 58-59.

<sup>23</sup> Surat keputusan (S.K) yang berlaku, yaitu berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi tertanggal 18 Juni 1912 No: 3418/136, yang diubah dan disempurnakan dengan SK tanggal 23 April 1913 No. 2281/57.

mereka adalah para kepala yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak dan mereka tidak mempunyai surat pengangkatan. Mereka dibebaskan dari pembayaran pajak, namun tidak menikmati pendapatan dari pemerintah menurut peraturan pemerintah. Selain itu, mereka juga menerima uang pada pemakaman seseorang (*pangeli tana*) dan pendapatan dari pungutan pajak pasar (*sussung pasara*).<sup>24</sup>

Baru pada 1 Januari 1911, daerah-daerah yang ditaklukkan itu kemudian disatukan dengan wilayah Sulawesi Tenggara dan dijadikan satu wilayah Pemerintahan Sulawesi Selatan dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). Daerah Pemerintahan ini dibagi kedalam tujuh bagian (*Afdeeling*), yaitu Makassar, Bonthain, Bone, Pare-Pare, Luwu, Mandar dan Buton dan Pesisir Timur Sulawesi (*Boeton en Oostkust Celebes*). Setelah pembaharuan-pembaharuan peraturan, maka tahun 1916, pembagian wilayah Pemerintahan, dibagi menjadi delapan wilayah Pemerintahan yaitu; Makassar, Bone, Sungguminasa, Bantaeng, Pare-Pare, Mandar, Luwu dan Sulawesi timur (*Oost Celebes*). Perubahan ini memantapkan pengaturan Pemerintahan dan wilayah kekuasaan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>25</sup> Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 27 April 1916 No. 49 dan dinyatakan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) 1916 No. 352. Edward L. Poelinggomang., *Op.Cit.*, hlm. 84.

## 2.2. Masyarakat Pertanian Dan Kondisi Sosial-Ekonomi Di Masa Peralihan

Masyarakat Bone, khususnya suku Bugis<sup>26</sup> merupakan salah satu masyarakat subsisten yang hidup dan berprofesi di sektor pertanian. Masyarakat Bone diatas segala-galanya petani, setelah mengelola persawahan, masyarakat Bone tampil sebagai perajin dan pelaut.<sup>27</sup> Masyarakat pertanian di daerah ini dibagi menjadi petani sawah (*paggalung*) dan petani ladang (*paddare*). Usaha dalam mata pencahariannya banyak beraktivitas di lahan persawahan, dan posisi usahanya tidak jauh dari letak perkampungan. Pertanian sudah dan terus menjadi sumber utama mata pencaharian penduduk pribumi Sulawesi Selatan.<sup>28</sup>

Kondisi masyarakat pedesaan dapat dibedakan atas dasar genealogis atau teritorial. Tipe masyarakat pertama, digambarkan pada masyarakat sebagai penggarap ladang dan tipe kedua ditemukan pada masyarakat yang mempraktekkan sistem pertanian sawah yang beririgasi.<sup>29</sup> Ciri masyarakat Bone adalah masyarakat pertama, mereka adalah penggarap atau pola masyarakat subsisten yang dominan di bawah pengaruh status sosial masyarakat Bone. Petani Bone yang berada dalam lingkup kekuasaan genealogis yang disebut sebagai *client*, adalah pemilik lahan adalah *patron* atau bangsawan. Konsep *patron-client* yang di masyarakat Bone

---

<sup>26</sup> *Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang 1912-1915., Op.Cit.,* hlm. 18 dan 100.

<sup>27</sup> *Ibid,* hlm. 27.

<sup>28</sup> Barbara S. Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII* (Yogyakarta: Grafity Press, 1993) hlm. 59.

<sup>29</sup> W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999) hlm. 103.

merupakan patronase yang terikat dalam satu bagian kompleks dalam kehidupan masyarakat Bone. Maka pertanian di Bone, menjadi gambaran satu-kesatuan melihat gerak aktivitas masyarakat tradisional tersebut.

Tata letak perkampungan Bone dibagi menjadi dua wilayah, di pantai dan pedalaman. Kampung-kampungnya banyak ditemukan disepanjang aliran sungai dan pesisir pantai, dan sungai-sungai kecil yang terdapat di wilayah perbukitan dan pegunungan. Banyak lahan persawahan ditemukan di sekitar wilayah aliran sungai dan pesisir pantai. Seperti di aliran sungai Walanae dan Cenrana. Daerah aliran sungai Walanae banyak menopang lahan pertanian Bone, jaringan sungai kecil yang menyambung dengan Walanae, menopang di wilayah Watampone dan Pattiro, sedangkan aliran sungai Cenrana menopang lahan persawahan di Pallime.<sup>30</sup>

Masyarakat petani Bone dengan komoditas utama beras dan jagung, terdapat juga tanaman lainnya yang dibudidayakan seperti tembakau, kelapa, kopi, serta jenis-jenis tanaman ke dua, kacang tanah, wijen, terong, keladi, ketela. Sayur-sayuran seperti labu, lombok, buncis, sawi dan mentimun (jarang diperoleh).<sup>31</sup>

Sejak masa Kerajaan, klasifikasi masyarakat di bone dibagi dalam 5 lapisan strata sosial, terdiri dari Raja-raja dan keturunannya, Bangsawan lainnya, Orang Bebas, Orang-orang yang menurut Pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagai

---

<sup>30</sup> C.A. van Affelen van Saemfoort, *Assistent Resident Bone*, 1909; Doerleben, *Civiel Gezaghebber Boni*, Nationaal Archief, 1913.

<sup>31</sup> *Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang 1912-1915.*, *Op.Cit.*, hlm. 27-30.

orang-orang bebas, namun masih digolongkan pribumi namun masih termasuk dalam kasta hamba, dan terakhir orang-orang tergadai/terjebak hutang.<sup>32</sup>

Di Sulawesi Selatan makin tinggi tingkat kebangsawanan seseorang makin banyak pengikutnya atau hubungan antara patron-klien. Hal ini merupakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, bahwa golongan yang lebih rendah tidak berkuasa atas golongan yang lebih tinggi dan ini juga berkaitan dengan sosial martabat. Begitu pula sebaliknya makin banyak pengikut makin tinggi pula martabat seseorang, yang penting pada masa itu adalah penguasaan tanah. Ada kemungkinan bahwa patron-patron di wilayah ini selain kaum bangsawan ada pula para tuan tanah atau bisa juga para pedagang. Terjalinnya hubungan antara patron dan klien di wilayah ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Dimana hubungan timbal - balik ini yang menyebabkan adanya saling memberi dan saling menerima, ini menguntungkan patron, sebab dengan adanya pengikut-pengikut atau hubungan patron-klien tersebut, dia tidak perlu menjalankan tugas atau pekerjaan yang dirasa kurang pantas untuknya.<sup>33</sup>

Hubungan patron-klien tampak nyata di daerah pertanian. Para klien dalam kehidupan sehari-hari membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan patronnya seperti memelihara tanaman padi serta menjaganya, membantu memperbaiki rumah atau membantu dalam persiapan perayaan-perayaan tertentu. Apabila klien ini belum menikah dia akan tinggal bersama patronnya, bahkan ada pula yang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 19 dan 101-102.

<sup>33</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang, Hubungan Patron-klien di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1988), hlm. 21-22.

dikawinkan oleh patronnya dan seluruh biaya ditanggung patronnya. Klien yang sudah kawin akan tinggal terpisah, tetapi jika ada panen mereka mendapat sebagian hasil dari sawah patronnya. Hubungan patron-klien ini dapat diputuskan setiap apabila salah satu pihak merasa tidak puas, namun keputusan ini tidak secara mendadak.<sup>34</sup>

Setelah penaklukan, kondisi sosial, ekonomi dan politik di Bone dibandingkan daerah lain Sulawesi Selatan memerlukan perhatian yang serius. Pelemahan dan pembatasan dari hak bangsawan serta banyaknya pranata kekuasaan dari bangsawan kerajaan dihapuskan. Bangsawan yang tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial atau memberikan tanda-tanda perlawanan akan diasingkan. Selain itu posisi bangsawan dalam aturan kependudukan Pemerintah Kolonial, statusnya menjadi setara dan dianggap dalam aturan kolonial menjadi rakyat biasa yang sederhana. Di satu sisi, pranata-pranata budak dihapuskan (1907). Dimana pandangan Pemerintah kolonial dalam membedakan status kependudukan tersebut, tidak berdasarkan pada pranata status sosial di Bone, melainkan perbedaan golongan antara Pribumi, Eropa dan Timur Asing.

Di wilayah *Onder Afdeling* Bone, di bagian pantai terdapat sejumlah kecil orang-orang Makassar, di Teluk Bone juga terdapat *To-Bajo* (Orang laut). Selanjutnya masih ada orang-orang Toraja, Buton Serta Muna yang tinggal.<sup>35</sup> Sedangkan di wilayah *Onderafdeeling* Bone Selatan (*Ri-Attang*), orang-orang

---

<sup>34</sup> *Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang 1912-1915., Op.Cit.,* hlm. 17.

<sup>35</sup> *Ibid,* hlm. 18.

toraja beserta keturunannya dapat dijumpai dalam jumlah terbatas. Orang Buton dan Sumba tidak ada lagi, sementara paling banyak 20 orang Makassar.<sup>36</sup>

Berdasarkan data kependudukan, masih belum ada data yang cermat dan jelas tentang jumlah penduduk di Bone. Berdasarkan pencacahan wajib pajak dari tahun 1907-1913 menghasilkan angka 48.117 penduduk di *Onderafdeeling* Bone.<sup>37</sup> Di Bone Selatan jumlah penduduk dari tahun 1910-1914 masing-masing 14.248, 15.252, 14.235, 15.822 dan 15.763 penduduk. Jumlah penduduk yang paling besar berada di pantai distrik Kajuara. Dengan adanya pelayaran dan tanah yang subur, Kajuara memiliki jumlah penduduk tertinggi dengan kepadatan penduduk 102 per-km. Setelah itu menyusul distrik Salomekko, Tonra, Mare, Kahu, Libureng dan Cani dengan masing-masing 20, 27, 50, 26, 10 dan 10 jiwa per-km. Wilayah Bone Selatan, luas 2300 km dengan rata-rata kepadatan penduduk 30 jiwa per-km.<sup>38</sup>

### **2.3. Pertanian Bone Di Masa Peralihan**

Era Departemen Pertanian mengalami perubahan. Perubahan tersebut menjadi awal perbaikan kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini sejalan dengan arah pelaksanaan kebijakan etis yang dirumuskan pada tahun 1900. Pemerintah Hindia Belanda telah melakukan segala upaya untuk menunjang dan memperbaiki kehidupan masyarakat, untuk

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 100.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 20.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 101-103.

meningkatkan pendapatan pemerintah.<sup>39</sup> Departemen Pertanian dibentuk dan departemen ini dibentuk atas prakarsa sekelompok ahli pertanian yang disertai tugas melakukan penelitian, dan pengawasan proyek serta merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki pangan.<sup>40</sup>

Pada tahun 1904, Pendirian Departemen Pertanian itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Kerajaan Belanda untuk membina pertanian rakyat sebagai prioritas utama. Selanjutnya pada tahun 1908, Pemerintah Kolonial mulai mengangkat banyak penasehat pertanian, hingga tindak lanjut tersebut ditandai pada tahun 1910 membentuk dinas penyuluhan Pertanian. Tahun 1908, Program-program yang diikuti dengan adanya kegiatan penyuluhan berupa pengenalan varietas-varietas baru padi dan tanaman lainnya. Sejak 1916, perkembangan tersebut terbentuk organisasi pengatur penyebaran benih.<sup>41</sup>

Pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai membentuk dinas pembantu pertanian di setiap cabang Pemerintahan *afdeeling* di Sulawesi Selatan. Di *afdeeling* Bone, dibentuklah dinas pembantu pertanian di setiap bagian Pemerintahan (*Onder Afdeling*), yakni Bone, Soppeng dan Wajo. Masing-masing dinas pembantu tersebut diberikan pembagian penempatan, wilayah Bone di tempatkan di Watampone, Soppeng ditempatkan di Watansoppeng, dan Wajo ditempatkan di Sengkang.

---

<sup>39</sup> Nahdia Nur, *Jejaring Perdagangan dan Integrasi Ekonomi: Sejarah Ekonomi Sulawesi Bagian Selatan 1900-1930*, Yogyakarta: Disertasi, 2017, hlm. 125.

<sup>40</sup> *Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang 1912-1915.*, *Op.Cit.*, hlm. 59.

<sup>41</sup> Dove, M.K. *Sistem Perladangan di Indonesia. 1988*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dinas-dinas pembantu ini kemudian dikoordinir secara struktural oleh Gubernemen di Makassar.<sup>42</sup>

Terbentuknya dinas penyuluh pertanian ini merupakan langkah awal dalam mengupayakan perbaikan ekonomi di bidang pertanian. Langkah awal para penyuluh pertanian melakukan pengidentifikasian dari potensi pertanian dengan pendataan kepemilikan tanah, luas lahan, bibit padi, curah hujan, dan kondisi hasil panen. Kemudian, mulai mengusahakan pembukaan lahan-lahan baru persawahan, pengenalan jenis varietas baru yang laku.<sup>43</sup>

Dalam masyarakat tradisional, pemilikan tanah masih bergantung dan terpusat kepada tanda-tanda kebesaran kerajaan. Tanah dikendalikan oleh penguasa sebagai pelindung tanda kebesaran tersebut. Belum ada data statistik yang secara lengkap menggambarkan kepemilikan dan luas sawah yang ada pada masa kolonial di Bone. Secara umum kepemilikan sawah dengan ukuran kecil, rata-rata berkisar 1-3 hektar di wilayah Bone dan Wajo. Berbeda dengan kepemilikan sawah yang luas sangat dominan di Soppeng. Sawah yang dikelola berdasarkan kepemilikan tanah persawahan yaitu tanah *ornament*, tanah *pabate* dan tanah yang tertimbun dari hasil tertimbunnya lumpur di tepi muara atau sungai.<sup>44</sup> Setelah masuknya

---

<sup>42</sup> W.E.G. Veen, (*Assistent-Resident*); *Memorie van overgave van de afdeling Bone*, Nationaal Archief, 1935.

<sup>43</sup> *Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang 1912-1915., Lot.Cit.*

<sup>44</sup> Barbara Harvey Sillary, *Op.Cit.*, hlm. 59.

kolonial mengatur kepemilikan tanah di Bone. Semua tanah kerajaan diatur dan ditata dalam pengaturan kolonial.<sup>45</sup>

Tanah ornament (*galung kasuwiyang*) yaitu tanah kepemilikan seorang pejabat dalam hal ini jabatan raja. Sebagian besar tanah ini diolah menurut kerja sistem kerja tanpa upah (kerja rodi) dan hasil panennya secara keseluruhan diserahkan kepada raja tanpa upah menuai. Namun sebagian besar tanah jabatan ini dipinjamkan kepada rakyat untuk diolah, dengan syarat pembagian bagi hasil 1/10 dari hasil panen. Pembagian hasil tersebut kemudian diserahkan sebagai upeti/pajak dalam bentuk sistem natura (*tampa*) yang mereka serahkan kepada raja.<sup>46</sup>

Tanah yang digolongkan tanah ornament/jabatan merupakan tanah jabatan dari kepala yang menduduki posisinya. Jika jabatan tersebut ditinggalkan, tanah tersebut harus ditinggalkan dan diserahkan kembali kepada raja. Sebagai dasar hukum, tanah ini tidak boleh dipindahtangankan. Suatu tanah jabatan dengan demikian selalu diberikan kepada yang berminat untuk di kelola sementara. Selanjutnya Tanah *Pabate*, pengguna dari tanah ini wajib memberikan 1/5 hasil panen sebagai upeti atau pajak. Pajak ini selalu dibayar dalam bentuk natura/ hasil bumi kepada *Cilaong* (kepala jannang). Pengguna tanah pabate memiliki hak dalam mengelola dan menggunakan tanah tersebut secara individual atau turun temurun. Kepemilikan tanah tersebut tidak boleh dirampas dari mereka selama mereka teratur memenuhi kewajiban mereka membayar upeti atau pajak. Selain tanah

---

<sup>45</sup> *Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang 1912-1915., Op.Cit.,* hlm. 43.

<sup>46</sup> *Ibid,* hlm. 41.

*pabate*, tanah-tanah yang terbentuk dari hasil tertimbunnya wilayah tepian dan muara-muara sungai dari lumpur, antara lain delta Walanae. Sama halnya dengan sistem *pabate*, wajib menyerahkan 1/5 hasil panen dan tanahnya juga dikelola secara individual atau secara turun temurun.<sup>47</sup>

Setelah kedatangannya, Pemerintah Hindia Belanda mengatur kembali sistem kepemilikan dan penggunaan tanah yang secara tradisional telah diatur oleh Kerajaan Bone. Pemerintahan Hindia Belanda mulai mencampuri pemerintahan adat di desa, ikatan-ikatan sosial antara pemimpin persekutuan (raja) dengan rakyatnya sangat dibatasi. Tanah-tanah sawah dan sumber penghidupan lainnya tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh desa. Tanah-tanah adat yang digarap diambil alih dan menjadi pemilik pemerintah swatantra (*tanah ornament*) serta tanah-tanah dimana pemiliknya didaftar serta kewajiban membayar upeti atau pajak. Penduduk tidak lagi menyerahkan hasil pertaniannya kepada raja, tetapi untuk Pemerintahan swatantra dalam bentuk pajak bumi (sisi administratif atau modern).

Seluruh tanah lain yang tersisa dari tanah adat, diklasifikasikan menjadi dua jenis tanah, tanah yang dikelola dan tanah yang tidak dikelola. Tanah yang dikelola tersebut dibedakan atas persawahan, perkebunan dengan tanaman keras/tahunan dan kebun dengan tanaman palawija. Semua jenis tanah persawahan merupakan hak milik yang digunakan secara individual oleh penduduk. Mula-mula kepemilikan tanah berasal dari hak pengelola pertama, yang diperoleh dengan jalan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 41-42.

mengolah tanah-tanah yang belum dikelola menjadi sawah. Kepemilikan ini dapat dipindahtangankan, digadaikan atau pemberian hadiah.

Kepemilikan tanah persawahan dapat hilang, jika pemiliknya menelantarkan tanahnya hingga menjadi tanah dalam kondisi yang tidak terkelola. Dimana tanah-tanah itu kembali menjadi seperti hutan alami atau pematang-pematang sawahnya sudah tidak dikenali lagi. Peraturan kepemilikan tanah jenis kebun dengan tanaman palawija juga berlaku sama. Berbeda dengan kepemilikan jenis tanah perkebunan dengan tanaman keras atau tahunan tetap merupakan milik individual turun temurun dari penanamnya. Sekalipun tanaman tersebut tidak terawat, tetapi tanah yang menjadi tempat berakarnya tanaman-tanaman itu tetap menjadi hak kelola dari penanamnya.<sup>48</sup>

**Tabel 1. Kondisi hasil panen di Bone (selatan) tahun 1905-1914**

<b>Tahun</b>	<b>Hasil panen</b>
1905	Baik
1906	Baik
1907	Cukup
1908	Cukup
1909	Tidak baik
1910	Gagal
1911	Gagal
1912	Gagal
1913	Baik
1914	Gagal

Sumber: Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang, 1912-1915, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan. Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 43-44.

Setelah kedatangan kolonial, dalam catatan kondisi hasil pertanian di Bone mengalami penggambaran kondisi yang tidak menentu. Dari tabel diatas, kurun 10 tahun terakhir sejak tahun 1905-1914, telah terjadi 3 (tiga) kali kondisi gagal panen. Kegagalan panen sejak tahun 1910-1912, membawa buntut keresahan ditengah masyarakat. Jumlah produksi padi yang kurang selama tiga tahun, mengakibatkan terjadinya kelangkaan beras, baik untuk diekspor maupun untuk dikonsumsi. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tercatat dengan hasil panen pada tahun 1910 hingga 1914 sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil panen di Bone Selatan tahun 1910-1914**

<b>Tahun</b>	1910	1911	1912	1913	1914
<b>Hasil panen</b>	Gagal	Gagal	Cukup	Baik	Gagal
<b>Jumlah penduduk</b>	14.248	15.252	14.235	15.822	15.763

Sumber: Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang, 1912-1915, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan. Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015.

Tabel-tabel hasil panen diatas, menunjukkan bagaimana kondisi pertanian di Bone Selatan pada tahun 1910-1914 menggambarkan penghasilan yang tidak memuaskan di wilayah Bone Selatan. Pada tahun 1910, hasil panen Bone selatan yang mengalami kegagalan panen, disebabkan dari kondisi kultur sawah yang dominan bertadah hujan. Kondisi ini membawa imbas kepada petani, terendamnya lahan persawahan akibat curah hujan yang panjang dan merusak padi di persawahan. Pertanian menentukan seluruh kondisi perekonomian masyarakat di Bone. Jumlah penduduk di Bone Selatan, 14.248 jiwa juga mendapatkan kondisi yang tidak menguntungkan. Berdasarkan laporan kondisi kesehatan masyarakat, penyakit-penyakit seperti Kolera menyerang masyarakat ini pada tahun 1911.

Bagi petani masih mengandalkan hujan sebagai sumber pengairan sawahnya, namun intensitas debit air yang berlebih juga berdampak buruk bagi pertanian. Hal ini berkaitan dengan adanya kebutuhan masyarakat petani untuk menambah kapasitas produksi sawahnya. Petani juga memiliki keinginan untuk menghasilkan padi yang lebih banyak dengan masa panen tidak terlalu lama. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pengairan (irigasi) benar-benar dibutuhkan oleh petani padi.<sup>49</sup>

Menurut catatan kolonial, pejabat Pemerintah Kolonial yang menjabat menunjukkan sikap konservatif, dibarengi dengan sikap malas, serta acuh tak acuh, hingga membuat usaha pertanian ini mengalami kegagalan di daerah Bone. Kondisi tersebut disebabkan cuaca yang tidak beraturan sehingga berakibat kegagalan panen. Hasil panen tersebut sifatnya dikategorikan jauh dari kata memuaskan, apalagi di sektor ekspor beras di Pelabuhan. Secara tidak langsung kondisi ini sangat rentan berdampak pada kehidupan bagi bangsawan, petani dan pemerintah kolonial.<sup>50</sup>

Berdasarkan data statistik curah hujan yang dicatat kolonial di Watampone dari tahun 1906-1913. Data tersebut dapat diamati sebagai berikut:

**Tabel 3. Statistik curah hujan di Watampone (1906-1913)**

Bulan/tahun	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
Januari	Tidak ada penga matan	123	174	95	147	136	228	58
Februari		127	286	135	135	66	239	114
Maret		278	247	136	126	188	212	336
April		438	125	133	290	134	408	501

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>50</sup> *Ibid*. hlm. 108-109.

Mei		270	363	172	325	333	391	635
Juni		248	354	542	337	230	621	690
Juli	243	198	218	148	283	69	338	344
Agustus	156	164	140	234	210	32	123	94
September	112	13	62	103	165	0	46	36
Oktober	182	142	131	205	329	39	9	45
November	96	252	208	82	209	56	125	29
Desember	213	113	294	90	182	265	280	-

Sumber: Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang, 1912-1915, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan. Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015. hlm 17.

Kondisi Dibandingkan kondisi curah hujan di Bone Selatan sangat tidak beraturan pada kurun 1912-1914, dapat diamati sebagai berikut:

**Tabel 4. Statistik curah hujan di Bone Selatan (1906-1913)**

Bulan	1912	1913	1914	
	Curah hujan pada siang/sore hari di Mare		Curah hujan siang hari	
			Mare	PalattaE
Januari	-	93,5	202	-
Februari	-	161,5	115	-
Maret	-	279	43	-
April	-	536	66,5	-
Mei	-	848	183	138
Juni	-	698	393	660
Juli	-	231,5	20	11
Agustus	-	21	22	0
September	-	3	0	0
Oktober	-	0	0	0
November	107	51	84	55
Desember	189	84	68	44

Sumber: Terjemahan Memory van Overgave Controlier Bone Riattang, 1912-1915, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan. Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015. hlm. 98-99.

Berdasarkan tabel statistik curah hujan diatas 3 dan 4, tabel 4 tersebut menunjukkan wilayah distrik Mare dan Palattae di Bone Selatan. Hujan turun pada bulan April, Mei dan Juni, sebaliknya bulan Agustus, September, dan Oktober

ditandai terjadinya kekeringan yang terbesar. Pada bulan Desember dan Januari turun sejumlah hujan. Dari gambaran di atas juga, tabel 3 dan 4 menggambarkan musim muson barat jatuh pada bulan September hingga Maret. Muson timur dari April-Agustus. Begitu pula dengan pada penghujung musim arah mata angin pada dasarnya dari tenggara dan pada musim panas terjadi angin barat.

Dari gambaran di atas juga, tabel 3 dan 4 menggambarkan kondisi musim yang terjadi di Bone, kondisi parah akibat kegagalan panen digambarkan setelah terjadi angin badai seringkali muncul pada bulan Mei dan Juni. Jika diamati kembali, data statistik tersebut, pada bulan desember inilah, penduduk memanfaatkan untuk menanam jagung, lalu panen diadakan bulan akhir Februari. Pada bulan Maret, sawah-sawah diolah dengan penanaman padi, di bulan Agustus, Padi tersebut mulai di panen.

Dampak dari buruknya produksi berpengaruh pada kegiatan ekspor. Penurunan ekspor beras ini dipengaruhi dari kondisi pertanian yang mengalami gagal panen akibat curah hujan yang tinggi. Kegiatan ekspor beras pada tahun 1909 dari di Bone berkisar *f.* 302.350, tahun 1910 Bone mengekspor sebanyak *f.* 474.354. Pada tahun 1911, Bone mengekspor lagi berasnya sebanyak *f.* 326.330, Selanjutnya beras diekspor pada tahun 1912 yang mencapai 5.747 pikul dan senilai 32.631 gulden. Sementara itu pada tahun 1913 ekspor beras mencapai 5.747 pikul yang senilai 32.631 gulden dari daerah Bulu. Sedangkan pada tahun berikutnya 1914 di ekspor beras 3251 pikul beras yang senilai 19.461 gulden.

Pembangunan irigasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bagi para petani bisa memanen dua kali setahun, juga tidak selalu tergantung pada

pengairan yang berasal dari air hujan. Maka upaya Pemerintahan Kolonial dalam laporan Rookmaker, diperlukan penempatan sarana dan prasarana irigasi yang dapat dirancang dan dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidang teknik.

Upaya lain dilakukan dalam peningkatan produksi pertanian dengan pembukaan lahan-lahan baru persawahan. Di Bone Selatan dilakukan pembukaan lahan yang cukup besar, terutama di distrik Kajuara, Salomekko, dan Mare. Pada tiga daerah ini budidaya padi cukup berkembang dan didapati persawahan sistem terasering dengan lahan pertanian basah hingga suatu ketinggian tertentu. Begitu pula dengan penanaman bibit padi persawahan yang kering dianjurkan disini umumnya dilakukan, baik disepanjang pantai maupun di pedalaman dapat dijumpai kompleks persawahan yang terbentang luas, dan tidak sampai 20%-nya menggunakan irigasi ditinjau dari kondisi wilayah dan struktur tanah.<sup>51</sup>

Persediaan bibit gabah tidak terlalu dipertimbangkan dan masih mempertahankan bibit lama yang digunakan petani. Kebiasaan petani dengan menyimpan gabah dari panen sebelumnya, atau memperolehnya dari tetangga atau kenalannya. Bibit yang ditanam antara lain jenis putih dan ketan. Menurut laporan kolonial hasil kualitas yang ditanam yang diperoleh kurang baik dan hasilnya bervariasi. Beberapa persawahan serta perladangan di gunung yang dapat menghasilkan beras yang putih-murni.

Dari jenis beras putih diatas yang banyak ditanam di sepanjang wilayah pantai seperti *Ase Banda Sama Tape*, *Ase Banda Jamala*, *Ase Panasas*, *Ase Beka*,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 109-110.

*Ase Unji, Ase Ulo, Ase Pance, Ase Tobe, Ase Tallan, Ase Cela, Ase Tabangka,* sedangkan *Ase Leppang* banyak ditanam di pedalaman. Selain beras putih, beberapa jenis ketan juga disebutkan seperti: *Ase Palai, Ase Anadara, Ase Tabungang, Ase Lotong, Ase Pasere, Ase Coyang, Ase Manceti, Ase Kaluku, Ase Bebu,* dan *Ase Jarang*. Dari jenis beras ketan yang banyak ditanam di sepanjang pantai, seperti; *Ase Palai, Ase Anadara, Ase Tabungang, Ase Lotong, Ase Pasere, Ase Coyang, Ase Manceti*. Sedangkan *Ase Kuluku* dan *Ase Bebu* ditanam di pedalaman

Beras ketan ditanam besar-besaran. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 30% dari keseluruhan hasil panen. Beberapa jenis beras umumnya utama ditanam, diantaranya: *Ase Banda Sama Tape, Ase Banda Jamal, Ase Panasa, Ase Beka, Ase Unji, Ase Ulo, Ase Pance, Ase Tobe, Ase Tallan, Ase Cela, Ase Tabangka, Ase Lappang, dan Ase Kassa*. Dari hasil keseluruhan jumlah penanaman padi yang ditanam di Bone Selatan, masing-masing ditanam beras ketan dengan persentase masing-masing dari jumlah secara keseluruhan, yakni 1/5 di distrik Mare, 1/10 Tonra, 1/20 di Salomekko, 1/10 di Kajuara, ¼ kahu dan 1/5 Cani.<sup>52</sup>

Hasil panen di *afdeling* Bone dinilai sejumlah ikat padi yang dihasilkan bruto dimana harga ikatan ini diberi harga *f.* 2,50. Kini harganya ditetapkan sebesar *f.* 10 per ikat. Nilai sawah di *onderafdeling* Bone juga ditetapkan seperti yang dimaksud di atas namun nilai terikat jauh lebih rendah yakni *f.* 1 – *f.* 1,50. Penyebab rendahnya nilai ini ditemukan pada buruknya kualitas padi.

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 111-112.

Padi sawah di Bone termasuk jenis padi yang menghasilkan beras berkualitas rendah dan dengan itu jelas tidak laku dalam perdagangan besar. Hasil panen yang tidak memuaskan, perhatian pemerintah kolonial dengan mengupayakan memasukkan jenis budidaya tanaman baru bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, yaitu jenis padi yang laku di pasar. Bila padi tidak dibedakan dari segi kualitas, beras menjadi andalan komoditas ekspor di Hindia Belanda.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 28.